



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP KEHIDUPAN  
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT PETANI DI  
KABUPATEN KARAWANG (1989-1997)**

**SKRIPSI**

**ANIEK NURFITRIANI  
0806343802**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JUNI, 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP KEHIDUPAN  
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT PETANI DI  
KABUPATEN KARAWANG (1989-1997)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora**

**ANIEK NURFITRIANI  
0806343802**

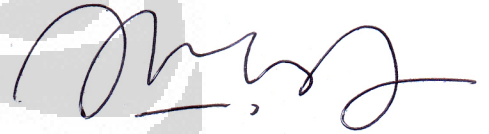
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JUNI, 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 15 Juni 2012



Aniek Nurfitriani

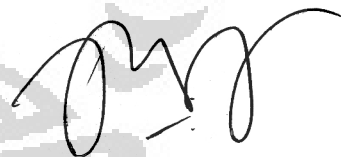
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia apabila terbukti melakukan tindak plagiat.

Nama : Aniek Nurfitriani

NPM : 0806343802

Depok, 15 Juni 2012





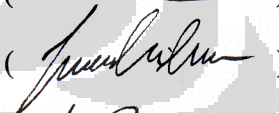
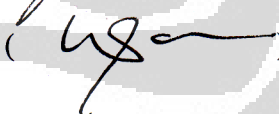
Aniek Nurfitriani

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Aniek Nurfitriani  
NPM : 0806343802  
Program Studi : S1 Ilmu Sejarah  
Judul Skripsi : Pengaruh Industrialisasi terhadap Kehidupan  
Ekonomi dan Sosial Masyarakat Kabupaten  
Karawang (1989-1997)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. M. Iskandar (  )  
Ketua Penguji : Abdurakhman, M.Hum. (  )  
Penguji : Iman Hilman, M.Hum (  )  
Panitera : Siswantari, M.Hum (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 11 Juli 2012

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 196551023199031002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, satu kalimat yang seharusnya saya panjatkan karena tanpa rahmat Allah SWT, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentu saja saya tidak sendiri dalam proses pembuatan skripsi ini. Maka dari itu, dalam halaman ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. M. Iskandar selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.
2. Bpk. Aja Suteja, Bpk. Asep Saefudin, dan para narasumber yang bersedia diwawancara untuk melengkapi penulisan skripsi.
3. Pegawai Dinas Pertanian dan Perhutanan di bidang kearsipan yang telah banyak membantu dan memudahkan saya mengakses laporan-laporan.
4. Kantor BPS Cabang Karawang yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengakses data-data statistik.
5. Raudhatun 'Rara' yang selalu mengajak diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan selalu menyemangati saya.
6. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pengumpulan sumber primer dan sekunder serta membantu penulisan penelitian ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 15 Juni 2012

Aniek Nurfitriani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

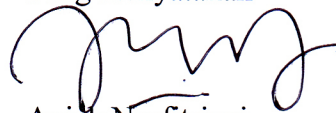
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aniek Nurfitriani  
NPM : 0806343802  
Program Studi : S1 Ilmu Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Industrialisasi terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Juni 2012  
Yang menyatakan



Aniek Nurfitriani  
NPM : 0806343802

## ABSTRAK

Nama : Aniek Nurfitriani  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Pengaruh Industrialisasi terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani Kabupaten Karawang (1989-1997)

Skripsi ini membahas kebijakan ekonomi Orde Baru mengenai industrialisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat petani di Kabupaten Karawang pada tahun 1989-1997. Hasil penelitian mendapati fakta bahwa Pemda Kabupaten Karawang membagi Karawang menjadi dua bagian, yaitu bagian selatan dikhususkan untuk kawasan industri dan bagian utara untuk pertanian. Pembagian ini mempengaruhi pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya petani. Urbanisasi, terbukanya kesempatan kerja, dan percampuran budaya menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan kehidupan sosial dan ekonomi petani ini. Kondisi ini baru terjadi di Karawang bagian selatan pada periode ini. Sedangkan petani di bagian utara Karawang belum terpengaruh industrialisasi hingga tahun 2000-an.

Kata kunci:

Industrialisasi, Karawang, kesejahteraan, Orde Baru, petani

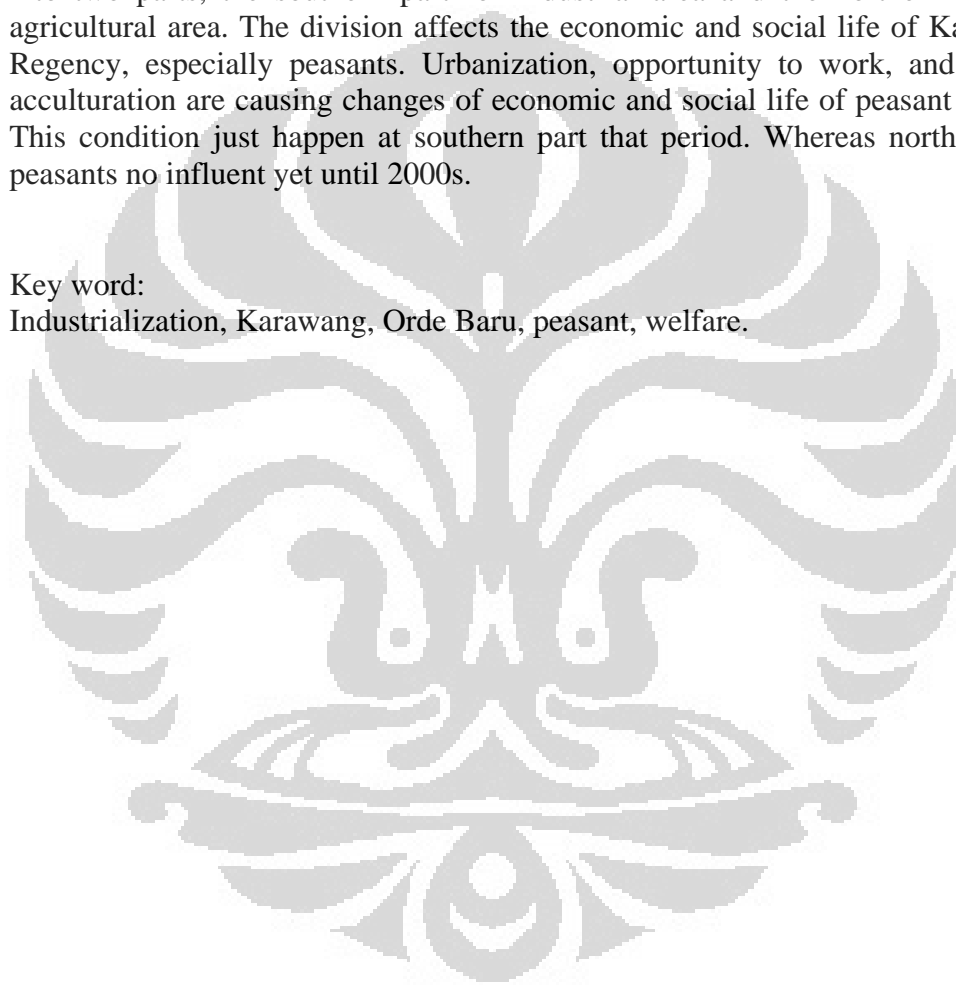


## ABSTRACT

Name : Aniek Nurfitriani  
Study Program : History Science  
Title : Industrialization Impact to Economic and Social Life of Peasant Society in Karawang Regency (1989-1997)

This research discusses Orde Baru economic policy of industrialization and its impact on the lives of peasant society in Karawang Regency at 1989-1997. The Writer found the fact that Karawang Regency Local Government split Karawang into two parts, the southern part for industrial area and the northern part for agricultural area. The division affects the economic and social life of Karawang Regency, especially peasants. Urbanization, opportunity to work, and culture acculturation are causing changes of economic and social life of peasant society. This condition just happen at southern part that period. Whereas northern part peasants no influent yet until 2000s.

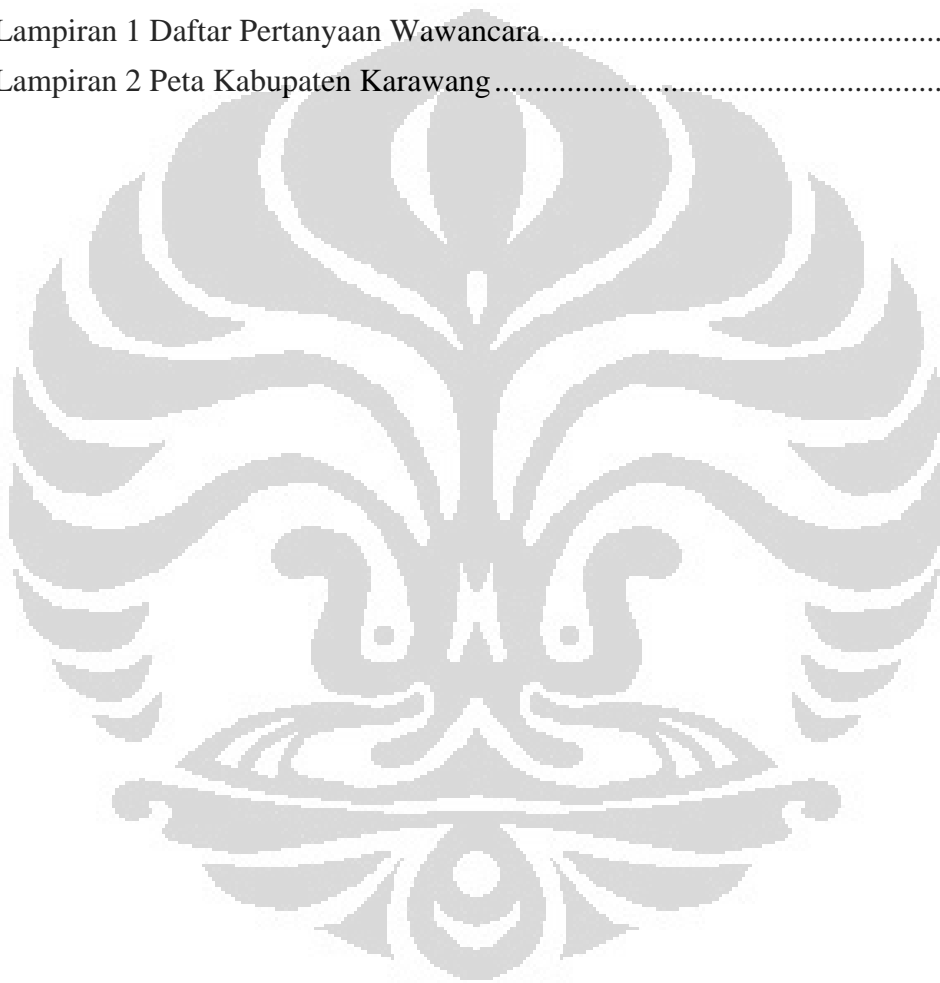
Key word:  
Industrialization, Karawang, Orde Baru, peasant, welfare.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KABUPATEN KARAWANG SEBELUM DAN SESUDAH SWASEMBADA BERAS</b> .....	<b>15</b>
2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karawang .....	15
2.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Kabupaten Karawang .....	17
2.3 Pelaksanaan Kebijakan Pangan di Kabupaten Karawang.....	21
2.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani Pasca Swasembada Beras.....	26
<b>BAB III PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN KARAWANG (1989-1997)</b> .....	<b>29</b>
3.1 Industrialisasi di Indonesia .....	29
3.2 Awal Industrialisasi di Kabupaten Karawang.....	32
3.3 Kebijakan Perindustrian di Kabupaten Karawang.....	34
3.4 Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Perindustrian .....	36

3.5 Perkembangan Perindustrian di Kabupaten Karawang.....	39
<b>BAB IV PENGARUH PERINDUSTRIAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PETANI KABUPATEN KARAWANG .....</b>	<b>44</b>
4.1 Pengaruh Industrialisasi terhadap Masyarakat Petani di Daerah Sekitar Kawasan Industri .....	44
4.2 Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang setelah Industrialisasi.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	62
Lampiran 2 Peta Kabupaten Karawang .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumbangan Kabupaten Karawang terhadap Stok Beras Nasional.....	6
Tabel 1.2 Jenis dan Luas Peruntukan Lahan Industri.....	8
Tabel 2.1 Keadaan Umum Pilot Proyek Bimas SSBM MT 1963/1964.....	21
Tabel 2.2 Luas Panen, Hasil Per Hektar, dan Produksi 1989-1997 .....	26
Tabel 3.1 Perkembangan Penduduk Kab. Karawang 1984-1997.....	37
Tabel 3.2 Rata-rata PDRB Per Kapita di Kab. Karawang 1989-1993 .....	38
Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri di Kab. Karawang 1992- 1998 Diperinci Menurut Jenis Fasilitas .....	41
Tabel 3.4 Banyaknya Tenaga Kerja Industri Sedang/Besar 1988-1997.....	42
Tabel 3.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Sektor Industri 1989-1998.....	42
Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia di Kab. Karawang 1991-1998.....	45
Tabel 4.2 Pendapatan per Kapita Responden per Tahun (1993).....	46
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Kab. Karawang Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 1993 dan 1996.....	48
Tabel 4.4 Rata-rata Pengeluaran Bersih per Tahun.....	49
Tabel 4.5 PPercentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di 6 Kecamatan di Karawang 1992.....	53

## DAFTAR SINGKATAN

Bimas	: Bimbingan Massal
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPSB	: Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
Bulog	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
IMWIC	: <i>International Maize and Wheat Improvement Center</i>
Insus	: Intensifikasi Khusus
IRRI	: <i>International Rice Research Institute</i>
ISIC	: <i>International Standard for Industrial Classification</i>
KIKT	: Kawasan Industri Karawang Terpadu
KUD	: Koperasi Unit Desa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PPL	: Pegawai Penyuluhan Lapangan
PPH	: Petani Pengamat Hama
NIB	: Negara-Negara Industri Baru
RPHD	: Regu Pengendalian Hama Tingkat Desa
UHSI	: Unit Hampan Supra Insus
VUTW	: Varietas Unggul Tahan Wereng
WP	: Wilayah Pembangunan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Beras merupakan makanan pokok hampir seluruh masyarakat dunia. Di daerah pedesaan Indonesia, terdapat anggapan bahwa kenaikan nilai sosial sebuah keluarga dihubungkan dengan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Anggapan ini menyebabkan jumlah kebutuhan akan beras terus-menerus meningkat.<sup>1</sup> Penggunaan beras sebagai makanan pokok bukan tanpa alasan, terlebih bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan beras memiliki kadar kalori dan protein yang cukup besar dibandingkan dengan bahan pangan lainnya.

Tanaman padi ini berasal dari kawasan Cina bagian selatan yang berbatasan dengan bagian utara Asia Tenggara dan bagian utara India ini telah ditemukan sejak 8.000 tahun lalu. Sedangkan berdasarkan temuan-temuan arkeologi, padi telah diperkenalkan di kepulauan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada pertengahan abad ke-2 SM.<sup>2</sup> Maka dapat diketahui bahwa sejak masa itu, beras menjadi makanan pokok penduduk Indonesia, terutama Jawa dan Bali.

Sebagian besar penduduk Indonesia, terutama Jawa dan Bali, bermatapencaharian sebagai petani. Dan seperti petani di Asia Tenggara lainnya, para petani ini merasa enggan untuk pindah ke sektor nonpertanian. Menurut James C. Scott, keengganan ini disebabkan oleh pandangan yang telah lama berakar dalam kehidupan petani, yaitu dahulukan selamat<sup>3</sup>. Petani lebih memilih untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya satu bencana daripada memaksimumkan

---

<sup>1</sup> Arifin, Bustanil. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1994. Hal. 8.

<sup>2</sup> Boomgaard, Peter dan David Henley (Editors). *Smallholders and Stockbreeders: History of foodcrop and livestock farming in Southeast Asia*. Leiden: KITLV Press, 2004. Hal. 47.

<sup>3</sup> Istilah ini dipinjam James C. Scott dari James Roumasset.

penghasilan rata-ratanya. Petani lebih memilih tidak membuka lahan baru atau menggunakan teknologi baru seperti bibit unggul untuk meningkatkan penghasilan karena membuka lahan atau teknologi baru memiliki risiko kerugian besar. Itulah mengapa sedikit sekali terjadi penambahan lahan pertanian di Jawa. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan petani tetap nyaman dengan ekonomi subsistennya dan tidak melakukan perubahan. Padahal menurut Raffles, jika petani tidak berusaha keras untuk melakukan perubahan, maka akan terjadi krisis pangan.<sup>4</sup>

Apa yang diramalkan oleh Raffles ini kemudian terjadi pada awal abad ke-20. Krisis pangan ini terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Jumlah produksi pertanian pangan memang meningkat, tapi peningkatannya tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Kejar-mengejar antara produksi pertanian dan pertumbuhan penduduk ini diperparah dengan Perang Dunia II dan kemerosotan dalam penanaman padi. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah kolonial untuk melakukan perbaikan dalam pertanian pangan. Sedangkan intensifikasi dengan metode budidaya padi yang dilakukan petani tidak dapat diperhitungkan, karena metode ini tidak membuahkan hasil yang positif, malah memperparah keadaan.<sup>5</sup>

Krisis pangan terus berlanjut hingga masa Orde Lama. Hingga tahun 1965, kondisi perekonomian Indonesia berada pada titik terendah akibat peristiwa Gestapu 1965. Inflasi mencapai 650%, jumlah uang beredar melonjak lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan hal yang paling parah, tipisnya persediaan beras.<sup>6</sup> Pada periode yang sama, 1960-an, muncul dua lembaga penelitian internasional yang berkonsentrasi pada masalah pangan, yaitu *International Maize and Wheat Improvement Center (IMWIC)* di Meksiko dan *International Rice Research Institute*

---

<sup>4</sup> Prof. DR. Ir. Widjang H. Sisworo. *Revolusi Hijau dan Swasembada Beras*. Dipublikasikan kembali oleh KerSip Open Source, 7 Maret 2011. Diunduh pada 7 Mei 2011.

<sup>5</sup> Sajogyo dan Willian L. Collier (Penyunting). *Budidaya Padi di Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986. Hal. 143.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 1.

(IRRI) di Filipina.<sup>7</sup> Didirikannya dua lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara rekayasa genetik dan pengembangan teknologi tanaman. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul yang tahan akan hama, berumur pendek, dan meningkatkan produksi pangan per hektar. Adanya usaha untuk meningkatkan produksi pangan ini, maka muncullah istilah Revolusi Hijau. Program Revolusi Hijau ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Orde Baru dengan nama Bimas atau Bimbingan Massal. Dalam Bimas ini diperkenalkan “panca usaha tani”, yaitu (1) pembangunan fasilitas dan sistem irigasi, (2) penyediaan bibit varietas unggul seperti VUTW dan IR-64, (3) penggunaan pupuk kimia, (4) penggunaan pestisida, dan (5) penanaman dengan cara tanam larikan dan sejajar.<sup>8</sup>

Indonesia, tepatnya Pulau Jawa, mulai mengimpor beras dari Saigon (Ho Chi Minh sekarang) pada tahun 1847.<sup>9</sup> Impor beras tersebut terus berlangsung hingga 130 tahun kemudian. Dengan dilaksanakannya program peningkatan produksi pangan baru ini, diharapkan Indonesia dapat swasembada<sup>10</sup>. Dicanangkannya program swasembada beras merupakan bentuk kesadaran Pemerintah bahwa masalah pangan adalah masalah yang krusial. Program swasembada beras sendiri pernah dilakukan pada masa Soekarno dan mengalami kegagalan. Sedangkan pada masa Soeharto, swasembada beras mulai digencarkan ketika Prof. Ir. Sudarsono Hadisaputro, seorang Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, menjadi Menteri Pertanian.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. DR. Ir. Widjang H. Sisworo. *Revolusi Hijau dan Swasembada Beras*. Dipublikasikan kembali oleh KerSip Open Source, 7 Maret 2011. Diunduh pada 7 Mei 2011.

<sup>8</sup> Subejo. *Globalisasi dan Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, 2005. Hal. 3.

<sup>9</sup> Bambang Bujono. *Kita dan Beras*. Majalah TEMPO, Edisi 16 November 1985. Dipublikasikan kembali di <http://tempo.online.com> dan diunduh pada hari Rabu, 13 April 2011 pukul 9:47.

<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasembada berarti usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau suatu kondisi di mana kebutuhan dalam negeri terpenuhi oleh produksi dalam negeri sendiri. Adapula pengertian bahwa konsep swasembada tersebut juga mencakup kemampuan untuk mengantisipasi ketidakpastian pertanian. Dengan kata lain, dalam konsep swasembada ini terdapat unsur cadangan.

<sup>11</sup> *Loc. Cit.* Hal. 243.



Pada tahun 1966, jumlah produksi beras mencapai 8,59 juta ton. Hasil survey BPS terhadap 65.000 keluarga sampel di desa dan kota seluruh Indonesia menyimpulkan bahwa kebutuhan beras per kapita per tahun 120 kg.<sup>12</sup> Jika produksi beras sebanyak 8,59 juta ton dibagi jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahun semakin bertambah, maka tidak akan tercapai sejumlah 120 kg per kapita. Pada tahun berikutnya, produksi beras mengalami peningkatan 0,17 juta ton, akan tetapi penduduk mengalami peningkatan lebih dari 2 juta jiwa. Keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 1973 dengan puncaknya terjadi pada tahun 1972. Penyebab krisis ini adalah terjadinya sikap optimis yang berlebihan, karena pada tahun-tahun awal Pelita I (1969, 1970, 1971) produksi beras selalu melebihi target.<sup>13</sup> Sikap optimisme yang berlebihan ini menyebabkan Badan Urusan Logistik (Bulog)<sup>14</sup> mengurangi jumlah impor beras.

Kegagalan yang terjadi di Pelita I kembali terjadi di Pelita II. Walaupun kenaikan produksi beras naik 3,6% dibanding sebelum memakai pada varietas unggul (kenaikan 2%), tapi tentu saja belum mencukupi kebutuhan pangan nasional dan Bulog masih mengusahakan impor beras. Tahun 1980 pun Bulog masih mengimpor beras, bahkan sampai 2 juta ton. Hal ini dimaksudkan untuk persiapan jika sewaktu-waktu terjadi gagal panen, kemarau terlalu panjang, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Sebelum Indonesia mencapai swasembada beras, Pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam program Bimas ini. Salah satu cara perbaikannya adalah mengintensifkan penggunaan daerah pertanian secara massal disertai syarat-syarat:

<sup>12</sup> Bambang Bujono. *Kita dan Beras*. Majalah TEMPO, Edisi 16 November 1985. Dipublikasikan kembali di <http://tempo.online.com> dan diunduh pada hari Rabu, 13 April 2011 pukul 9:47.

<sup>13</sup> Arifin Hutabarat. *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1974. Hal. 75.

<sup>14</sup> Bulog merupakan lembaga yang didirikan Pemerintah pada tanggal 10 Mei 1967 untuk menggantikan Komando Logistik Nasional (Kolognas). Bulog berfungsi sebagai lembaga stabilisator dan menjamin distribusi beras. Didirikannya Bulog adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk menciptakan ketersediaan beras di pasaran. Intervensi Pemerintah ini telah dilakukan sejak zaman kolonial. Hal ini disebabkan oleh harga beras merosot tajam pada tahun 1933. Petani mengalami kesulitan membayar pajak karena penghasilan berkurang. Karena kasus inilah, Pemerintah Kolonial menyadari perlunya intervensi yang melembaga. Pada tahun tersebut, Pemerintah Kolonial mengeluarkan *Rijst Invoer Ordonantie* 'Pengaturan Impor Beras'.

<sup>15</sup> *Opcit*.

sarana produksi dan kredit bunga rendah harus mudah didapat oleh petani dan meningkatkan program penyuluhan.<sup>16</sup> Pemerintah juga melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang pertanian, seperti jalan, irigasi, bendungan, dan sebagainya, serta melakukan perimbangan antara harga hasil pertanian dengan harga barang-barang lainnya. Pembangunan fasilitas ini semakin gencar dilakukan ketika terjadi boom minyak tahun 1980-an yang meningkatkan anggaran untuk pertanian.<sup>17</sup>

Perubahan yang baik memang tidak terjadi secara tiba-tiba, ia harus perlahan tapi konsisten. Usaha Pemerintah dalam sektor pertanian untuk mencapai swasembada akhirnya terwujud pada tahun 1985, meskipun memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun. Bahkan badan pangan dan pertanian dunia, *Food and Agriculture Organization* (FAO), menunjuk Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang berhasil memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri. Keberhasilan ini pun membawa Presiden Soeharto berpidato di depan sidang dua tahunan FAO di Roma, Italia pada tanggal 14 November 1985. Soeharto pun dipuji oleh FAO sebagai kepala negara yang memiliki “pandangan jauh ke depan dan telah memberikan aspirasi kepada petani” karena memanfaatkan keuntungan minyak untuk pengembangan pertanian, yang kekayaannya akan terus dapat diperbaharui.<sup>18</sup>

Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan memang tidak mengherankan, karena pada tahun 1980 peningkatan produksi beras semakin meyakinkan. Menurut Bustanil Arifin, Kepala Bulog pada masa itu, dalam wawancaranya dengan TVRI menyatakan bahwa jika dikurangi 10% untuk stok nasional, jumlah produksi beras masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Selisih ini memang kecil pada tahun itu, tapi perbedaannya mulai terlihat pada tahun 1983, ketika produksi beras hampir mencapai 24 juta ton. Jika menggunakan rumusan Biro Pusat Statistik yang melakukan survei kepada 65.000 keluarga dengan sampel di desa dan kota, yaitu jika kebutuhan beras per kapita per tahun adalah 120 kg, maka

---

<sup>16</sup> *Opcit.* Hal. 76.

<sup>17</sup> *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

konsumsi beras pada tahun 1983 adalah 19 juta ton. Jadi setelah dikurangi 10% untuk stok nasional, sisa produksi tahun 1983 sekitar 2,5 juta ton. Jumlah ini akan semakin bertambah ketika jumlah produksi pada tahun 1985 meningkat hingga 26,3 juta ton dengan kebutuhan konsumsi hanya 19,8 juta ton.<sup>19</sup> Swasembada beras ini tidak akan berhasil, jika tidak ada distribusi beras yang baik karena tidak semua kota di Indonesia mengalami surplus produksi atau bahkan, ada kota yang tidak menitikberatkan sektor pertanian sebagai sektor utama Pemerintah daerah. Maka di sinilah peran kota-kota penghasil utama padi, seperti Karawang. Sumbangan Karawang terhadap stok pangan nasional dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1.1 Sumbangan Kabupaten Karawang terhadap stok Beras Nasional Tahun 1984/1985-1988-1989

Tahun	Realisasi Produksi (ton)	Hasil Pengadaan Pangan (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Mark.table Surplus (ton)	%
1984/1985	741.286	59.515	183.914	497.857	67,16
1985/1986	717.506	77.634	196.522	443.350	61,79
1986/1987	728.250	60.394	193.217	474.350	65,18
1987/1988	939.145	74.277	198.432	666.439	70,96
1988/1989	872.003	88.880	202.401	580.722	66.60

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perhutanan Kab. Karawang

Tidak heran memang jika Karawang berperan besar dalam swasembada beras, karena kabupaten ini telah dikenal sebagai kota lumbung padi sejak Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia, 1628-1629. Pada saat itu, Karawang<sup>20</sup> dijadikan sebagai pusat logistik bagi tentara-tentasa Mataram. Hingga sekarang pun, Karawang masih tetap disebut dengan kota lumbung padi. Karawang

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pada saat itu, luas Karawang tidak sama dengan luas Karawang pada saat ini. Dulu, luas Karawang mencakup Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Karawang.

disebut sebagai lumbung padi disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah luas lahan pertanian yang sangat luas. Pada tahun 1989, luas areal pertanian mencapai lebih dari 99.000 hektar. Luas areal pertanian ini didukung oleh aliran dua sungai besar yaitu sungai Citarum dan Cilamaya.

Demikianlah hasil dari kebijakan pangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru sebagai implikasi dari kebijakan pemulihan perekonomian. Selain kebijakan pangan, Pemerintah Orde Baru pun mengeluarkan kebijakan industri. Salah satu penyebab dikeluarkannya kebijakan industri adalah ketidakseimbangan kegiatan perekonomian Indonesia yang lebih mengutamakan kegiatan pertanian. Industrialisasi berkembang pesat sejak Orde Baru berkuasa hingga tahun 1975, kemudian berkembang lagi pada tahun 1980-an.

Pada tahun 1989, Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 53 yang berisi mengenai kebijakan kawasan industri. Oleh karena letak yang cukup strategis dan memiliki jalan tol yang akan memudahkan transportasi, maka Karawang dipilih menjadi salah satu kawasan industri. Pada tahun 1990, dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 593 yang berisikan penetapan luas areal industri di Jawa Barat seluas 18.000 Ha. Dari sembilan kabupaten di Jawa Barat, Karawang mendapatkan jumlah terbesar peruntukan lahan industri, yaitu 5.500 Ha. Alih fungsi lahan sawah pada periode 1989-1995 sekitar 1.328 Ha. Kemudian pada periode 1996-2000 konversi mencapai 548 Ha.<sup>21</sup> Selanjutnya pada periode 2001-2006 terdapat 381 Ha lahan yang dikonversi menjadi lahan industri. Menurut Purwanto, laju kecepatan konversi sekitar 139 Ha per tahun. Akumulasi kehilangan sawah selama 18 tahun mencapai 2.500 Ha dengan penurunan produksi padi mencapai 25.000 ton per tahun.<sup>22</sup> Sedangkan dalam *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dinyatakan bahwa Kabupaten Karawang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan luas areal industri sebesar 19.000 Ha. Luas lahan yang

---

<sup>21</sup> KOMPAS, 25 September 2007.

<sup>22</sup> Semiarto Aji Purwanto. (2010). Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus Pertanian Kota di Jakarta Timur. Disertasi UI. Hal. 217.

diklaim Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang ini berbeda dengan data yang didapatkan oleh Purwanto dari Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang pada tahun 2007. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jenis dan Luas Peruntukan Lahan Industri

Peruntukan lahan	Luas total	Luas terbangun	Jumlah (unit)
Kawasan Industri	5.837,5	2.250	124
Kota Industri	8.100	2.442,8	223
Cadangan Industri	7.100	-	-
	21.037,5	4.692,8	347

Sumber: Diolah oleh Purwanto dari Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang 2007<sup>23</sup>

Tujuan utama kebijakan perindustrian Pemerintah adalah menyeimbangkan kegiatan ekonomi Indonesia, meningkatkan pendapatan nasional dan penduduk, dan mengurangi angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri memang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Setelah dikeluarkannya Keppres No.53 Tahun 1989 dan SK Gubernur Jawa Barat No. 593, kegiatan industri di Kabupaten Karawang semakin meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat untuk bekerja di bidang industri dan luas areal industri yang terus bertambah.

Ketertarikan masyarakat Karawang pada kegiatan industri dapat dilihat dari penambahan jumlah pekerja. Pada tahun 1989, hanya terdapat 51 dari 550 lowongan kerja di lapangan usaha industri. Kemudian pada tahun 1991 terjadi peningkatan pesat, yaitu terdapat 6.984 dari 24.564 lowongan kerja yang telah terisi setelah pada tahun 1990 hanya 2.101 lowongan kerja yang terisi.<sup>24</sup> Peningkatan-peningkatan ini terus terjadi hingga Karawang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia saat ini.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 214.

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik. Karawang dalam Angka tahun 1989-1991.

Penelitian ini menarik dilakukan karena pesatnya kegiatan industri dan konversi lahan besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan perekonomian di Kabupaten Karawang. Perubahan kegiatan perekonomian ini tentu saja akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh industrialisasi terhadap kehidupan masyarakat petani di Kabupaten Karawang pada tahun 1989-1997. Karawang, seperti telah dijelaskan di atas, telah lama menjadi kota lumbung padi. Munculnya industrialisasi, dengan dilakukannya konversi besar-besaran lahan pertanian ke industri, tentu akan berdampak banyak pada kegiatan pertanian dan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk kota ini. Dari rumusan masalah ini, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah:

- 1) Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menyikapi pesatnya laju industrialisasi demi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, khususnya buruh tani?
- 2) Bagaimana pengaruh perindustrian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Karawang?
- 3) Apakah pengaruh industrialisasi tersebut menyebar ke seluruh daerah di Kabupaten Karawang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan perkembangan perindustrian di Kabupaten Karawang pada tahun 1989-1997.

- 2) Menganalisis pengaruh perkembangan perindustrian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Menganalisis sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menyikapi pesatnya laju industrialisasi untuk ketahanan pangan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan sejarah, dikenal beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan, yaitu segi temporal, spasial, dan tematis. Pembatasan dilakukan agar penelitian lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar ke permasalahan-permasalahan lain. Dari segi temporal, penelitian ini difokuskan pada periode 1989-1997. Pada periode ini, Presiden tiga kali mengeluarkan keputusan mengenai kawasan industri, yaitu tahun 1989, 1993, dan 1996. Keppres Nomor 98 Tahun 1993 berfungsi menyempurnakan Keppres Nomor 53 Tahun 1989, sedangkan Keppres Nomor 41 Tahun 1996 mencabut keppres sebelumnya dan menggantinya dengan peraturan baru. Peraturan baru ini memberikan Pemerintah daerah wewenang mengenai izin Usaha Kawasan Industri. Penelitian ini diakhiri pada tahun 1997, karena pada tahun tersebut terjadi krisis ekonomi yang berdampak besar bagi kegiatan perekonomian.

Dari segi spasial, penelitian ditujukan di Kabupaten Karawang dengan fokus pada Kecamatan Lemahabang. Dipilihnya Karawang karena kabupaten ini merupakan salah satu kota lumbung padi di Indonesia tapi kemudian, dijadikan kawasan industri oleh Pemerintah. Sedangkan alasan pengambilan Kecamatan Lemahabang karena kedua kecamatan tersebut memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan letaknya berdekatan dengan kawasan industri. Dari segi tematis, penulisan dibatasi pada kehidupan petani sebelum dan sesudah adanya perindustrian

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa data yang dikelompokkan dalam dua kategori. Kategori pertama, penelitian kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen penting yang mendukung sebagai sumber primer, yaitu berupa

data-data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia dan cabang Karawang dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Orde Baru, beberapa laporan penelitian, dan artikel-artikel majalah sezaman. Kategori kedua adalah sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tema mengenai pengaruh perindustrian terhadap pertanian di Kabupaten Karawang telah banyak dibahas, seperti beberapa tesis UI yang salah satunya berjudul “Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)” oleh Maturidi Satar. Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam pengaturan ruang, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lahan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap industrialisasi, kesempatan kerja, dan urbanisasi.

Selain tesis, terdapat pula disertasi UI berjudul “Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus Pertanian Kota di Jakarta Timur” oleh Semiarto Aji Purwanto. Disertasi ini menjelaskan mengenai pertanian kota yang dilakukan oleh komunitas petani kota migran dari Karawang. Menarik dari disertasi tersebut adalah bagaimana perindustrian berakibat sangat besar bagi kegiatan pertanian, seperti gaya hidup masyarakat urban. Selain itu, dalam disertasi ini pun menguatkan bahwa sebagian besar petani Karawang hanyalah buruh tani atau petani penggarap. Sedangkan pemilik lahan pertanian sebagian besar warga asli Karawang yang tidak tinggal di kabupaten tersebut.

Penulis juga menggunakan buku “*Peasants and Peasant Society*” yang merupakan kumpulan tulisan, salah satunya tulisan Andrew Pearse mengenai pengaruh industri terhadap masyarakat petani dan Eric R. Wolf yang memiliki teori mengenai faktor penyebab keterlibatan petani dalam politik. Sedangkan untuk masalah pertanian sendiri, karena penelitian ini mengenai kehidupan masyarakat petani, maka penulis juga menggunakan “Moral Ekonomi Petani” yang ditulis oleh



James C. Scott. Buku ini sesuai dengan keadaan masyarakat petani Karawang yang selalu mendahulukan keselamatan perekonomiannya.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Selain metode sejarah, dilakukan pula proses historiografi, yaitu proses rekonstruksi imajinatif dari masa lalu berdasarkan data yang diperoleh, yang sering dipersatukan dengan metode sejarah.<sup>25</sup> Tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, intrepetasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang dianggap relevan.<sup>26</sup> Pada tahap ini, sumber-sumber yang dicari adalah sumber primer dan sumber sekunder.

Pada tahap pertama ini, penulis berhasil mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang didapatkan penulis adalah berupa laporan tahunan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, data statistik yang diolah oleh Biro Pusat Statistik (BPS), beberapa laporan penelitian dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), hasil dari beberapa Simposium Penelitian Tanaman Pangan yang telah dibukukan LIPI, Majalah TEMPO, dan kumpulan berita periode 1966-1973 yang telah dibukukan dengan judul “Usaha Mengatasi Krisis Pangan”. Kemudian data yang dijadikan sebagai sumber sekunder di antaranya adalah Bustanil Arifin dengan judul *Pangan dalam Orde Baru*; Amang Beddu dengan judul *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*; Mohammad Jafar Hafsa dengan judul *Kedaulatan Pangan*; Joan Hardjono dengan judul *Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*; James C. Scott dengan judul *Moral Ekonomi Petani*; Anne Both dengan judul *Ekonomi Orde Baru*; Thee Kian Wie dengan judul *Industrialisasi di Indonesia*; beberapa Tesis UI mengenai pertanian dan perindustrian di Kabupaten Karawang; dan lain-lain. Dengan digunakannya sumber-

---

<sup>25</sup> Louis Gottschalk. (1969). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. Hal. 39.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 23-24.

sumber sekunder, tambahan data dapat diperoleh untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Setelah mendapatkan data-data yang relevan dengan tema, penelitian dilanjutkan pada tahap metode sejarah selanjutnya, yaitu kritik sumber. Kritik sumber dilakukan dengan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh fakta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan cara meneliti bentuk fisik dan sumber data. Sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara menganalisa materi agar mendapatkan data yang terpercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Penulis lebih banyak menggunakan data statistik terbitan BPS untuk sumber primer dan menyebabkan penulis lebih mudah menguji keautentikan sumber untuk proses kritik eksternal. Bagian lain dalam melakukan kritik eksternal adalah menilai kredibilitas para penulis buku yang dipakai penulis. Pada proses ini, penulis menggunakan buku-buku yang telah direkomendasikan, seperti Anne Both yang telah banyak menulis mengenai perekonomian pada masa Orde Baru dan Bustanil Arifin yang menguasai masalah pangan Indonesia. Pada proses kritik internal, penulis pun tidak mengalami kesulitan karena sebagian besar sumber sekunder yang didapatkan penulis saling mendukung satu sama lain, seperti tulisan karya Anne Both dan Thee Kian Wie.

Setelah melalui proses kritik sumber, data-data tersebut kemudian diinterpretasikan menjadi fakta-fakta sesuai deskripsi peristiwa yang akan diteliti. Tidak semua data dapat dimasukkan untuk ditulis, karena hanya data-data relevan saja yang akan digunakan. Kemudian, dilakukan langkah selanjutnya, yaitu menuangkan hasil penelitian ke dalam historiografi. Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap perkembangan industri serta akibatnya terhadap kehidupan ekonomi buruh tani di daerah timur Kabupaten Karawang (Kecamatan Telagasari dan Lemahabang) tahun 1989-1997 dalam bentuk narasi.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari lima bab. Bab 1 berupa pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan dijelaskan mengenai kehidupan ekonomi petani Kabupaten Karawang, terutama buruh tani sebelum diturunkannya Keppres No.53 tahun 1989 mengenai kawasan industri. Apakah kehidupan buruh tani lebih baik, dengan asumsi swasembada beras dan perbaikan pertanian, sebelum munculnya keputusan mengenai kawasan industri atau tidak ada perubahan sama sekali. Dalam bab 3 akan dibahas mengenai awal masuknya perindustrian, faktor-faktor pendukung munculnya perindustrian, dan jenis-jenis industri yang berkembang di Karawang. Kemudian bab 4 akan dijelaskan mengenai pengaruh industri terhadap masyarakat Karawang dan apakah pengaruh tersebut menyebar merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bab 5 merupakan kesimpulan bagaimana industrialisasi berpengaruh pada masyarakat petani di Karawang.

## BAB II

### KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KABUPATEN KARAWANG SEBELUM DAN SESUDAH SWASEMBADA BERAS

#### 2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karawang

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6°34' LS. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha yang merupakan 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat. Lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Karawang dijadikan sebagai lahan pertanian, terutama persawahan. Pada tahun 1989, luas lahan sawah Kabupaten Karawang mencapai 99.506 hektar. Kabupaten Karawang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Subang di sebelah timur, Kabupaten Bekasi di sebelah barat, Kabupaten Bogor dan Cianjur di sebelah selatan, dan Kabupaten Purwakarta di sebelah tenggara.

Kabupaten Karawang memiliki variasi ketinggian wilayah antara 0-1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-2 %, 2-15 % , 15-40 %, dan diatas 40 % dengan suhu rata-rata 27° C.<sup>1</sup> Ketinggian yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Datarannya yang relatif rendah cocok untuk pertanian. Pada bagian selatan memiliki ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Di wilayah ini juga terdapat sumber-sumber bahan tambang, yaitu pasir, batu, tanah merah, batu kapur dan sirtu. Karena adanya bahan galian dan dataran yang relatif tinggi serta berbukit-bukit, bagian selatan ini tidak begitu cocok untuk

---

<sup>1</sup> *Gambaran Umum Kabupaten Karawang*. <http://karawangkab.go.id>.

pertanian. Bahkan jika ditanami tanaman palawija, hasilnya tidak akan begitu menjanjikan.<sup>2</sup>

Kabupaten Karawang dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Citarum dan Cilamaya. Karena dialiri oleh dua sungai besar yang menyebabkan tanah di sekitarnya subur dan pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Karawang. Sungai Citarum terletak di antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, sedangkan Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang.

Kabupaten Karawang telah mengalami pemekaran wilayah sebanyak tiga kali pada periode tahun 1984-1997. Pada tahun 1984, terdapat sebanyak 14 kecamatan. Tahun 1992, terdapat 17 kecamatan dan tahun 1997, terdapat 18 kecamatan<sup>3</sup>, yaitu Kecamatan Pangkalan, Telukjambe, Klari, Cikampek, Jatisari, Cilamaya, Lemahabang, Telagasari, Karawang, Rawamerta, Tempuran, Rengasdengklok, Pedes, Batujaya. Pada tahun 1992, pemekaran terjadi dengan dibuatnya tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pakisjaya, Cibuaya, dan Tirtamulya. Kemudian tahun 1997, ditambahkan dengan Kecamatan Tirtajaya. Dilakukannya pemekaran wilayah disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Pada kurun waktu 13 tahun, pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang mencapai 315.945 jiwa.

Sebagian besar penduduk usia angkatan kerja (usia 10 tahun ke atas)<sup>4</sup>, pada tahun 1990 bermatapencaharian sebagai petani, yaitu sekitar 52,18% dari 489.303 jiwa. Sedangkan sisanya, yaitu 1,09% di sektor pertambangan dan pangan lain, 6,85% di sektor industri, 0,09% di sektor listrik, gas, dan air minum, 3,75% di sektor

<sup>2</sup> Wawancara dengan Rohaeti pada Minggu, 6 Mei 2012 pukul 17.00.

<sup>3</sup> *Laporan Tahunan 1984-1993*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. *Karawang dalam Angka 1988-1997*. Kantor Statistik Kab. Karawang.

<sup>4</sup> Azwini Kartoyo dan Diah Widarti. *Indikator Pendidikan, Angkatan Kerja, dan Aktivitas Ekonomi*. "Seminar Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Sistem Pelayanan Data untuk Mentoring Perkembangan Wilayah Kecil." Jakarta, 22-24 April 1985. Diterbitkan oleh BPS. Hal. 66.

bangunan/konstruksi, 15,53% di sektor perdagangan, 0,80% di lembaga keuangan, 15,82% di sektor jasa kemasyarakatan.<sup>5</sup>

## 2.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Kabupaten Karawang

Dalam kehidupan ekonomi petani dikenal istilah ekonomi subsisten dan involusi pertanian. Maksud dari subsisten adalah masyarakat hidup dengan penghasilan yang hanya sekadar untuk menyambung hidup. Terjadinya kondisi tersebut disebabkan petani berbeda dengan suatu perusahaan kapitalis. Petani merupakan suatu unit konsumsi sekaligus unit produksi.<sup>6</sup> Petani subsisten juga lebih “mengutamakan selamat”, karena kegagalan panen sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Sering petani menjual sawahnya yang tidak seberapa atau hewan pembajak untuk menutupi kebutuhannya ketika panen gagal. Atau jika si petani masih ingin mempertahankan sawahnya untuk ditanami musim tanam berikutnya, ia harus rela berhutang. Di Karawang, petani biasanya berhutang pada petani yang lebih kaya atau pada bank, dalam hal ini BRI.<sup>7</sup>

Dari data statistik yang didapatkan, jumlah lahan pertanian di Kabupaten Karawang semakin menyempit, bukan bertambah luas. Pada tahun 1986, luas lahan pertanian<sup>8</sup> mencapai 100.484 hektar dan pada tahun berikutnya bertambah 124 hektar lalu tahun 1988 berkurang 457 hektar. Pengurangan ini terus terjadi hingga pada tahun 1997, luas lahan pertanian hanya 93.904 hektar. Jadi, selama kurun waktu 11 tahun (1987-1997), terjadi penyempitan lahan pertanian seluas 6.704 hektar. Penyempitan lahan pertanian ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan populasi penduduk Kabupaten Karawang. Pada kurun waktu yang sama, penduduk Kabupaten Karawang bertambah sebanyak 235.496 jiwa.<sup>9</sup> Penyempitan lahan ini disebabkan

---

<sup>5</sup> Kantor Statistik Kab. Karawang tahun 1991.

<sup>6</sup> James C. Scott. (1981). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. Hal. 19.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ihsan pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 08.00.

<sup>8</sup> Luas lahan pertanian keseluruhan mencakup lahan teknis, setengah teknis, sederhana PU, sederhana non PU, dan tadah hujan.

<sup>9</sup> *Loc. Cit.*

oleh alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan areal industri. Mengenai penyempitan lahan akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Disamping itu, tidak semua petani memiliki lahannya sendiri. Seperti halnya di Indonesia secara umum, petani di Kabupaten Karawang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Petani pemilik, yaitu petani yang memiliki sawah. Biasanya disebut tuan tanah, karena sebagian besar tidak menggarap lahannya sendiri. Sistem yang dipakai adalah sistem bagi hasil. Sistem ini akan dijelaskan di bawah.
- b) Petani pemilik penggarap, yaitu petani yang memiliki dan menggarap tanahnya sendiri. Petani kelompok ini biasanya memiliki tanah > 5 Ha.
- c) Petani penggarap atau penyakap, yaitu petani yang menggarap tanah orang lain. Petani kelompok ini lebih sejahtera kehidupan ekonominya dibandingkan buruh tani, karena menggunakan perjanjian bagi hasil. Orang yang menjadi petani penggarap biasanya orang-orang yang telah dipercaya oleh para pemilik lahan.
- d) Buruh tani, yaitu petani yang hanya mengerjakan hal-hal kecil seperti mencabut rumput, menimbang hasil panen, dan sebagainya. Ketika bukan musim tanam atau panen, petani kelompok ini biasanya mengadu nasib ke kota, dalam hal ini, Jakarta dan Bekasi.

Adanya empat kelompok petani ini menyebabkan munculnya sistem patron-klien atau *dunungan-bujang*<sup>10</sup>. Sistem ini tidak pernah terpisah dalam kehidupan ekonomi petani. Ketika mereka, petani penyakap membutuhkan bantuan keuangan saat panen gagal atau lainnya, mereka lebih memercayai patronnya untuk peminjaman uang. Sedangkan patron memang “menunjang” kehidupan kliennya. Sistem patron-klien ini terjalin dari hubungan antara pemilik tanah dengan petani penyakap. Para buruh tani pun tidak jauh berbeda dengan para petani penyakap. Jika mereka menguli pada

---

<sup>10</sup> Bahasa Sunda: majikan-bawahan.

seorang pemilik sawah, mereka jarang pindah menguli pada pemilik sawah yang lain. Seperti petani penyakap, buruh tani juga menganggap pemilik sawah yang ia kerjakan sebagai *dunungan*-nya.

Di Jawa Barat, begitu pula di Karawang, dikenal tiga bentuk penyewaan, yaitu bagi hasil (*sharecropping*), penyewaan dengan pembayaran uang, dan penggadaian (*mortgaging*).<sup>11</sup> Bagi hasil merupakan sistem penggunaan lahan pertanian dengan cara pemilik tanah mengizinkan orang lain menggarapnya dengan imbalan sebagian atau sepertiga hasil panen. Pemilik tanah biasanya membiayai semua biaya dari awal menanam sampai panen. Sebagian atau sepertiga hasil panen sudah termasuk pengurangan semua biaya tersebut. Bagi hasil juga disebut dengan *maro* atau *mertilu*. Sistem *maro* lebih sering digunakan di Karawang, karena kedua belah pihak merasa saling menguntungkan dengan hasil panen sama besar. Sistem ini lebih populer dibandingkan penyewaan dan penggadaian.

Penggadaian tidak banyak digunakan karena membawa beban sosial.<sup>12</sup> Penggadaian sawah dilakukan jika petani benar-benar terdesak, yaitu pengeluaran yang sangat besar. Pengeluaran sangat besar ini biasanya untuk membangun rumah bata atau sepeda motor. Walau demikian, menggadaikan tanah lebih disukai petani daripada menjual sawah, karena petani masih dapat mengelola tanahnya dengan sistem bagi hasil. Sedangkan jika menjual sawah, si petani tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki sawah yang tergadai tersebut. Penggadaian juga bukan berarti tanah si miskin digadaikan menjadi hak milik si kaya, karena terkadang orang kaya pun menggadaikan beberapa bagian tanahnya kepada petani-petani kecil.<sup>13</sup> Jika si petani yang menggadaikan sawahnya tidak dapat membayar hutangnya atau menebus sawahnya, maka sawahnya tidak akan menjadi hak miliknya lagi.

---

<sup>11</sup> Joan Hardjono. (1990). *Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 119.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 131.



Kepemilikan tanah didapat dari warisan, pernikahan, dan pembelian. Pewarisan tanah dilakukan dari orangtua ke anak dengan merata tanpa membedakan jenis kelamin. Seringkali terjadi sepasang suami istri membeli tanah atas nama anak-anaknya, berurutan dari yang terbesar hingga terkecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pewarisan. Tanah warisan boleh dijual, tapi biasanya yang membeli masih memiliki ikatan kekeluargaan<sup>14</sup>.

Sedangkan melalui pernikahan, tanah milik laki-laki yang sudah menikah menjadi milik bersama, sedangkan tanah milik wanita yang sudah menikah tetap menjadi hak miliknya sendiri. Ketika suami-istri bercerai, tanah warisan menjadi hak milik masing-masing. Sedangkan tanah yang dibeli ketika menikah dibagi rata.

Di Kabupaten Karawang, terutama Kecamatan Lemahabang, perekonomian petani tidak hanya ditunjang dari hasil pertanian saja. Sebagian besar petani penyakap dan buruh tani memiliki pekerjaan sampingan lainnya. Seperti Bapak Jasim memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang urut, Bapak Basri sebagai pembuat bata, Bapak Usep menjadi supir keluarga pemilik sawah yang ia sakap. Demikian pula dengan petani pemilik. Para petani pemilik juga memiliki pekerjaan sampingan lainnya, seperti berdagang, pemilik pabrik, dan sebagainya.

### **2.3 Pelaksanaan Kebijakan Pangan di Kabupaten Karawang**

Pada musim tanam (MT) 1963/1964 merupakan awal dari perkembangan produksi beras nasional dengan diadakannya pilot proyek Bimbingan Massal (Bimas) SSBM untuk pertama kalinya di Kabupaten Karawang.<sup>15</sup> Terdapat tiga desa yang dijadikan sebagai tempat proyek, yaitu Desa Karawang Kulon, Desa Tunggakjati, dan Desa Tanjungpura di Kecamatan Karawang<sup>16</sup>. Dari hasil proyek ini didapatkan bahwa rata-rata hasil produksi padi jauh lebih tinggi dibandingkan hasil

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Engkay Rokayah pada hari Sabtu, 19 Mei 2012 pukul 16.00.

<sup>15</sup> DR. Ir. Mohammad Jafar Hafsa. (2006). *Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 32.

<sup>16</sup> Sekarang ketiga desa ini berada di Kecamatan Karawang Barat. Setelah terjadi pemekaran, Kecamatan Karawang dibagi menjadi dua, yaitu Karawang Timur dan Karawang Barat.

produksi bukan proyek. Berikut rincian hasil dari Pilot Proyek Bimas SSBM Musim Tanam 1963/1964.

Tabel 2.1 Keadaan Umum Pilot Proyek Bimas SSBM Musim Tanam 1963/1964 di Kab. Karawang<sup>17</sup>

Desa	Luas Areal (Ha)	Peserta (orang)			Rata-rata Kw/Ha		
		Pnggrp tetap	Pmlk pnggrp	Jml	Dalam proyek	Luar proyek	Beda
Tunggakjati	50.6	48	30	78	62.5	25	37.5
Krw. Kulon	26.5	37	6	43	68.9	24	44.5
Tanjungpura	26.1	20	21	20	62.2	43.7	18.5
Jumlah	103.2	105	57	141	64.53	30.9	33.63

Keterangan: 1) Sumber: Djatijanto K. (1967)

2) Rata-rata hasil dalam padi kering panen

Pelaksanaan kebijakan pangan di Karawang tidak mungkin dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat, dalam hal ini petani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pangan, terutama Supra Insus, yaitu komunikasi media massa, kepemimpinan, dan pendidikan.<sup>18</sup> Dari penelitian yang dilakukan Lailil Kadar, keempat faktor ini cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Pada awalnya, banyak masyarakat petani menolak perubahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh, seperti yang telah dibahas oleh Geertz dan Scott, petani di Karawang memiliki kecenderungan takut untuk mengambil risiko. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi tetap subsisten. Penolakan terhadap perubahan tersebut seperti menanam bibit unggul di sekeliling sawah dan bibit yang biasa dipakai di bagian dalam sawah. Alasan penolakan ini disebabkan oleh petani lebih percaya dengan

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Lailil Kadar. (1998). *Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Petani dalam Melaksanakan Supra Insus*. TESIS UI. Hal. 94-104.

cara bertanam yang selalu mereka pakai. Terlebih, mereka belum memiliki pengetahuan tentang teknologi baru yang belum tentu hasil panen menjadi lebih menguntungkan. Banyaknya penolakan ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan adanya program penyuluhan.

Akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, televisi dan radio telah dikenal oleh masyarakat Karawang, bahkan beberapa orang yang berkecukupan telah memiliki salah satu atau kedua alat informasi tersebut. Pemerintah memanfaatkan media massa sebaik-baiknya untuk menyiarkan informasi mengenai modernisasi pertanian kepada para petani. Pemerintah juga melakukan peningkatan fasilitas komunikasi di pedesaan-pedesaan. Selain itu, ada pula program Koran Masuk Desa. Masyarakat pedesaan, khususnya Karawang, masih memiliki daya beli yang terbatas. Maka, pemerintah memberikan bantuan, seperti televisi agar dapat ditonton masyarakat desa.<sup>19</sup>

Pemimpin di desa memiliki pengaruh sosial yang besar. Pemimpin di sini dapat berupa pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang menjabat sebagai pegawai pemerintah, seperti camat. Sedangkan pemimpin informal adalah tokoh masyarakat atau kelompok elite. Dalam penelitian Lailil Kadar, penyampaian informasi mengenai modernisasi pertanian lewat pemimpin formal cukup baik, sedangkan dari pemimpin informal sama sekali tidak ada. Penyebab tidak adanya informasi yang disampaikan oleh pemimpin informal karena beberapa kelompok elite tertentu mencoba mempertahankan status quo-nya. Walaupun mereka memberikan informasi, biasanya informasi tersebut telah mengalami perubahan sehingga kurang memiliki nilai.<sup>20</sup>

Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat karena jika pendidikan seseorang tinggi, maka ia akan lebih mudah menerima perubahan yang terjadi. Pendidikan bisa dibedakan menjadi pendidikan formal dan informal. Taraf pendidikan masyarakat di Karawang pada masa itu masih cukup rendah,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 99.

karena masyarakat yang berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga perguruan tinggi masih terbatas. Tapi, pendidikan masyarakat telah lebih baik karena banyak masyarakat yang telah duduk di sekolah menengah pertama.

Terdapat empat institusi yang didirikan oleh lembaga pemerintahan Kabupaten Karawang untuk memudahkan pelaksanaan program Bimas<sup>21</sup>, yaitu:

a) Institusi Perbenihan

Di Indonesia terdapat penyedia benih seperti Perum Sang Hyang Sri, IRRI Cihea, dan penangkar benih lainnya di Kabupaten Karawang dengan sertifikasi dari Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)

b) Institusi Pengendalian hama/penyakit

Untuk mengendalikan hama/penyakit, dibentuk Regu Pengendali Hama Tingkat Desa (RPHD) dan Petani Pengamat Hama (PPH) yang disertai dengan alat pemberantas hama.

c) Institusi Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh aparatur negara/tenaga penyuluh pertanian. Pada tahun 1990, jumlah aparat dinas di Kabupaten Karawang sebanyak 82 orang dan PPL 132 orang.<sup>22</sup> Pada masa pemerintahan Soeharto, penggerakkan aparatur negara dan tenaga penyuluh pertanian sangat dirasakan oleh para petani. Menurut Bapak Aja, gotong royong antara petani dan orang PPL sangat terasa. Kegotongroyongan ini sangat dirasakan petani misalnya ketika melakukan pembasmian hama. Oleh karena kebersamaan ini, para petani menuruti apa yang dikatakan orang PPL, selain karena petani juga menganggap orang PPL lebih pintar dari mereka.

<sup>21</sup> *Laporan Tahunan 1989*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### d) Institusi Penunjang

Institusi penunjang merupakan institusi yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pertanian, seperti KUD, BRI, dan lain sebagainya. KUD cukup berpengaruh dalam kehidupan petani pada masa itu dan banyak petani yang menjadi anggota. Harga pupuk yang dijual KUD lebih murah, dan harga gabar di tingkat KUD lebih mahal dibandingkan non KUD.

Sedangkan untuk pelaksanaan program, dilakukan empat usaha pokok, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi.

#### a) Intensifikasi

Selain padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan dilakukan usaha intensifikasi melalui Supra Insus, Insus, dan Inmum. Wilayah Supra Insus di Kabupaten Karawang seluas 85.000 Ha yang dibagi menjadi empat wilayah Unit Hampan Supra Insus (UHSI), yaitu:

UHSI K V meliputi Kecamatan Karawang, Klari, Pangkalan, dan Telukjambe  
 UHSI K VI meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Batujaya, dan Pedes  
 UHSI K VII meliputi Kecamatan Telagasari, Lemahabang, Rawamerta, dan Tempuran  
 UHSI K VIII meliputi Kecamatan Cikampek, Jatisari, dan Cilamaya

Ketika terjadi pemekaran wilayah, UHSI K VI ditambah dengan Kecamatan Pakisjaya dan Cibuaya dan UHSI K VIII ditambah dengan Kecamatan Tirtamulya.

#### b) Ekstensifikasi/Rehabilitasi

Pelaksanaan program kedua ini dengan cara penarikan kredit yang telah diberikan kepada petani pengambil Kredit *Free Financing* pencetakan sawah baru/rehabilitasi sawah bera dan penyelesaian sertifikat tanah bagi petani yang

telah melunasi kredit tersebut. Selain pengembangan wilayah pertanian, dilakukan pula pembinaan secara terus-menerus kepada masyarakat. Akan tetapi, pencetakan sawah baru belum terlaksana dengan baik karena telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, selama kurun waktu 11 tahun (1987-1997), terjadi penyempitan lahan pertanian seluas 6.704 hektar.

#### c) Diversifikasi

Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman tumbuhan agar petani tidak ketergantungan terhadap satu jenis tanaman. Usaha ini dilakukan dengan pola tanam padi-padi-palawija dan padi-padi-sayuran. Program ini dinyatakan berjalan dengan baik, terlebih ketika bibit kacang kedelai untuk pertama kalinya ditanam di Kecamatan Telagasari.

### **2.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani Pasca Swasembada Beras**

Swasembada beras, seperti telah dijelaskan sebelumnya, terjadi pada tahun 1985. Dengan terjadinya swasembada, diasumsikan bahwa masyarakat petani Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang mengalami kesejahteraan. Beberapa petani mengakui swasembada membawa kesejahteraan, karena mereka dapat membeli motor atau mobil.<sup>23</sup> Tapi kesejahteraan tersebut hanya dinikmati oleh para petani yang memiliki tanah luas. Buruh tani sendiri tidak merasakan hal tersebut. Rata-rata upah buruh di Jawa Barat pada tahun 1994 untuk buruh mencangkul hanya sebesar Rp 3.104,00, buruh menanam Rp 2.039,00, dan buruh *merambet* Rp 2.122,00.<sup>24</sup> Sedangkan ketiga pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari sepanjang musim tanam.

Swasembada beras ternyata berumur pendek. Umur pendek ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pertambahan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, areal industri, perdagangan, perkantoran, dan sebagainya. Swasembada beras dinyatakan berakhir karena Indonesia kembali mengimpor beras

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Engkay Rokayah pada hari Sabtu, 19 Mei 2012 pukul 16.00.

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Karawang.

tahun 1990-an. Begitu pula dengan Karawang, sejak tahun 1990, hasil produksi padi tidak pernah mencapai angka 79 kuintal per hektar. Jumlah hasil produksi padi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Luas Panen, Hasil Per Hektar, dan Produksi Padi Tahun 1989-1997

No.	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen (Ha)	Hasil per Hektar (Kw)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Hasil per Hektar (Kw)	Produksi (Ton)
1.	1989	193.723	79,28	1.535.800	741	32,90	2.438
2.	1990	183.312	59,82	1.096.638	1.451	33,12	4.805
3.	1991	181.851	56,05	1.019.232	1.098	24,96	2.741
4.	1993	187.595	65,00	1.219.306	1.460	41,88	6.115
5.	1994	186.973	65,21	1.219.258	938	42,16	3.955
6.	1995	186.414	66,53	1.240.187	961	42,37	4.072
7.	1996	185.393	66,68	1.239.200	516	42,38	2.191
8.	1997	184.106	66,8	1.231.88	528	42,5	2.245
9.	1998	179.911	51,00	917.640	518	24,79	1.284

Sumber: Kantor Statistik Kab. Karawang

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pada padi sawah sebanyak 439.162 ton pada tahun 1990 dan kemudian turun lagi sebesar 77.406 ton pada tahun 1991. Pada tahun 1993, kenaikan terjadi sebesar 200.074 ton dan turun kembali pada tahun 1994. Hingga tahun 1997, terus terjadi kenaikan dan penurunan hasil produksi sawah. Akan tetapi, pada kurun waktu 1989 – 1998 kenaikan tidak pernah mencapai jumlah sebesar tahun 1989 dan menurun drastis pada tahun 1998.

Data ini didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang periode 1989-1998, sektor pertanian mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 1989, laju pertumbuhan sektor pertanian 3,59% kemudian turun pada tahun 1990 menjadi -

2,16%. Tahun 1993 kembali meningkat sebesar 4,53% dan lagi menjadi 1,30%. Kenaikan dan penurunan ini masih terbilang wajar dibandingkan penurunan yang terjadi tahun 1998, yaitu -11,75%. Padahal, pada tahun sebelumnya hanya -0,47%.<sup>25</sup>

Penurunan hasil produksi padi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional dan sikap Pemerintah terhadap kebijakan pangan. Pemerintah mulai melakukan deregulasi kebijakan-kebijakan karena permasalahan makro ekonomi yang sulit akibat resesi dunia sejak 1983 dan keuangan negara yang semakin sulit akibat anjloknya harga minyak bumi pada tahun 1986/1987.<sup>26</sup> Deregulasi kebijakan-kebijakan ini berakibat pada perberasan Indonesia, misalnya subsidi pupuk. Pupuk kimia sangat membantu petani untuk meningkatkan hasil produksi padi per hektar. Akan tetapi, kondisi keuangan Pemerintah yang kurang baik menyebabkan Pemerintah kesulitan untuk melakukan subsidi. Harga pupuk akhirnya ditekan sesuai dengan *real cost*-nya, bahkan selama 4 Pelita, harga pupuk mengalami kenaikan hingga 7 kali.<sup>27</sup> Jadi, penurunan hasil produksi yang terjadi pada tahun 1989 merupakan pengaruh dari kondisi yang telah diuraikan di atas.

Jika disimpulkan dari data-data di atas, masyarakat petani Kabupaten Karawang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sejak tahun 1989. Penurunan ini, selain penurunan hasil produksi, juga disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, terutama krisis ekonomi 1998. Krisis ekonomi menyebabkan berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan drastis. Di Kabupaten Karawang, 7 dari 9 sektor perekonomian mengalami penurunan hingga ke angka minus. Bahkan, sektor industri pengolahan yang tahun 1990-an menguasai kegiatan perekonomian di

---

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha tahun 1989-1993 dan 1994-1998*.

<sup>26</sup> Arifin, Bustanil. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1994. Hal. 265.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 273.



kabupaten ini mengalami penurunan drastis dari angka 5,08% pada tahun 1997 ke angka -23,32% pada tahun 1998.<sup>28</sup>

Namun, kondisi tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para petani. Sebagian besar petani menyatakan bahwa krisis ekonomi maupun swasembada pangan sama sekali tidak berpengaruh pada kondisi perekonomian mereka. Mereka menyatakan, sejak dulu, perekonomian petani tidak pernah berubah, yaitu hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan atau dengan kata lain, subsisten. Bahkan beberapa petani menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan krisis moneter.<sup>29</sup> Petani tidak mengetahui adanya krisis moneter karena mereka tidak melihat perbedaan ketika setelah dan sebelum krisis moneter.

Bahkan, seorang petani menuturkan bahwa harga gabah termahal baru terjadi beberapa tahun terakhir (2010-2012). Pada zaman Soeharto, harga gabah tidak akan pernah setinggi sekarang, yaitu Rp 400.000 per kuintal.<sup>30</sup> Pernyataan ini sesuai dengan data Dolog Wilayah V Kabupaten Karawang, yaitu harga gabah tertinggi hanya mencapai Rp 41.600 per kuintal (harga di tingkat KUD) pada tahun 1995-1996.

---

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha tahun 1989-1993 dan 1994-1998*.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Ihsan pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 08.00.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Oyo pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 12.20.

**BAB III**  
**PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN KARAWANG**  
**(1989-1997)**

**3.1 Industrialisasi di Indonesia**

Industrialisasi di Indonesia merupakan keniscayaan, karena Indonesia termasuk negara berkembang yang pada umumnya lebih tertarik pada gagasan industrialisasi. Bagi para politisi, menurut Gunnar Myrdal, industrialisasi yang diwujudkan dengan pendirian pabrik-pabrik besar dan modern merupakan simbol dari kemajuan dan pembangunan.<sup>31</sup> Menurut M. Dawam Rahardjo, ada alasan-alasan lain yang menyebabkan sektor industri lebih penting untuk dikembangkan dibandingkan sektor pertanian. Pertama, penanaman modal di sektor pertanian dinilai kurang menguntungkan. Kedua, tekanan perkembangan penduduk menyebabkan sektor pertanian terkena hukum “hasil yang makin kecil” (*law of diminishing return*). Ketiga, pertumbuhan sektor pertanian dianggap lebih lambat.<sup>32</sup>

Kegiatan ekonomi Indonesia dapat dikatakan tidak seimbang. Karena sejak abad ke-19, kegiatan ekonomi Indonesia dipusatkan pada sektor pertanian, sedangkan sektor industri hampir tidak dikembangkan sama sekali. Pertambahan penduduk di Indonesia semakin pesat, maka kebutuhan akan lahan pemukiman semakin besar dan menyebabkan lahan pertanian semakin menyempit. Jika lahan pertanian semakin sempit, maka penyerapan tenaga kerja pun berkurang. Padahal, sektor pertanian memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah dengan penghasilan yang rendah pula. Hal ini pula lah yang menyebabkan Pemerintah melirik sektor industri, karena selain dapat meningkatkan produksi barang dan pendapatan nasional, industri juga dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah kesempatan kerja.

---

<sup>31</sup> M. Dawam Rahardjo. (1990). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI-Press. Hal. 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Pemulihan ekonomi merupakan fokus utama Pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan industrialisasi berkembang pesat pada masa Orde Baru. Terdapat empat periode pada masa Orde baru yang menunjukkan pertumbuhan sektor industri yang berbeda-beda.<sup>33</sup> Periode pertama, periode stabilisasi dan rehabilitasi. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan “pintu terbuka” terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Peraturan mengenai PMA diperkenalkan pada tahun 1967 dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1968. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kebijakan liberalisasi mulai diberlakukan pula. Jika melihat perkembangannya, dapat dikatakan bahwa sektor industri pada umumnya berkembang tidak mengembirakan pada periode pertama. Hal ini disebabkan oleh iklim ekonomi dan politik yang serba tidak menentu serta kebijakan Pemerintah semakin diarahkan kepada cabang-cabang industri milik negara, misalnya dalam bentuk prioritas penjatahan kredit bank dan devisa.<sup>34</sup>

Periode kedua, periode *boom* minyak, 1973-1981. Pada periode ini, industrialisasi dipacu karena kombinasi dari kebijakan substitusi impor, peraturan investasi, dan peningkatan kepemilikan Pemerintah. Menurut Ariff dan Hill, struktur proteksi tarif Indonesia yang khas ini mengakibatkan timbulnya ‘kecondongan anti-eksport’ dan sangat eksklusif pada substitusi impor.<sup>35</sup> Faktor-faktor utama penentu orientasi ekonomi ke dalam ini adalah menumpuknya permintaan konsumen yang belum terpenuhi, cepatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan campur tangan pemerintah yang semakin meluas. Pengembangan substitusi impor didukung oleh sejumlah besar tarif bea masuk dan pajak penjualan barang impor dibebankan sekaligus bersama-sama dengan tarif bea masuk.<sup>36</sup> Adanya pajak penjualan yang sangat protektif disebabkan oleh presentase, seringkali, lebih tinggi dibandingkan dengan pajak penjualan domestik. Akan tetapi, menurut ukuran internasional, pertumbuhan industri Indonesia pada periode kedua ini termasuk cepat, seperti yang

---

<sup>33</sup> Thee, Kian Wie. (1994). *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES. Hal. xx-xxii.

<sup>34</sup> Booth, Anne dan Peter McCawley (Peny.). (1981). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES. Hal. 81.

<sup>35</sup> Mohamed Ariff dan Hal Hill. (1988). *Industrialisasi di ASEAN*. Jakarta: LP3ES. Hal. 23.

<sup>36</sup> Thee, Kian Wie. (1994). *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES. Hal. 29.

dinyatakan Bank Dunia bahwa sektor manufaktur telah tumbuh 12,8% pada periode 1970-1980. Tambahan lagi, angka BPS menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 12,6% pada periode 1971-1980 berdasarkan harga konstan tahun 1978.<sup>37</sup> Walaupun pertumbuhannya cukup pesat, tapi peranannya sektor industri dalam struktur ekonomi belum begitu banyak perubahan, karena sejak tahun 1953 hingga 1972, sumbangan sektor industri terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berubah, yaitu masih sekitar 9%.<sup>38</sup>

Periode ketiga, yaitu tahun 1982-1985 ketika terjadi penurunan harga minyak dan disebut sebagai periode kebijakan industrialisasi ambivalen. Disebut ambivalen karena pada satu sisi, terdapat pengurangan dan penekanan terhadap industri berat dan proyek padat modal oleh Pemerintah. Sedangkan di sisi lain, selama 1983-1985, sistem tata niaga impor, penggunaan instrumen non-tarif, dan peningkatan upaya komponen domestik meningkat. Pada periode ini, ketergantungan terhadap proteksi tarif menurun.

Periode keempat, yaitu tahun 1986-1990-an ketika terjadi perubahan arah kebijakan industrialisasi yang menggarisbawahi peningkatan efisiensi, persaingan, dan orientasi ekspor. Orientasi ekspor ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kekecewaan atas substitusi impor, keberhasilan negara-negara industri baru (NIB) di Asia, dan perubahan iklim intelektual yang lebih menekankan pentingnya ekspor, dan dipercepat dengan diselenggarakannya studi tentang perdagangan dan industrialisasi di negara-negara berkembang. Kekecewaan terhadap substitusi impor disebabkan oleh sistem ini gagal untuk melahirkan pertumbuhan keluaran (*output*) industri manufaktur dan kesempatan kerja yang berkesinambungan; barang-barang pengganti impor tidak jadi merembes masuk ke pasar ekspor sebagaimana yang telah diperkirakan.<sup>39</sup> Transformasi struktural sektor industri di Indonesia ini menyebabkan

---

<sup>37</sup> M. Dawam Rahardjo. (1990). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI-Press. Hal. 187.

<sup>38</sup> M. Dawam Rahardjo. (1990). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI-Press. Hal. 187.

<sup>39</sup> Mohamed Ariff dan Hal Hill. (1988). *Industrialisasi di ASEAN*. Jakarta: LP3ES. Hal. 27.

semakin meluasnya keterlibatan perusahaan-perusahaan perdagangan multinasional dalam ekspor barang manufaktur.

Pada periode keempat inilah pembahasan bab 3 mengenai industrialisasi akan difokuskan.

### **3.2 Awal Industrialisasi di Kabupaten Karawang**

Pada periode keempat tersebut, Pemerintah beberapa kali mengeluarkan undang-undang tentang perindustrian, seperti UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330). Industrialisasi di Indonesia semakin pesat dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Pada tahun 1993, Keppres Nomor 53 Tahun 1989 diganti dengan Keppres Nomor 98. Kemudian keputusan ini dicabut dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 41 Tahun 1996. Perubahan peraturan pada Keppres Nomor 53 Tahun 1989, seperti menambah butir 8 pada Pasal 1 mengenai bentangan lahan yang diperuntukkan Perusahaan Kawasan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemda Tingkat II yang bersangkutan. Kemudian mengubah Pasal 5, Pasal 8, 12, dan menghapus ketentuan Pasal 10. Sedangkan isi Keppres Nomor 41 Tahun 1996 adalah mengenai Kawasan Industri yang dikembangkan oleh Pengusaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Dalam peraturan ini disebutkan pula bentuk perusahaan kawasan industri, yaitu:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Koperasi;
- 3) Perusahaan Swasta Nasional;

- 4) Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
- 5) Badan Usaha Patungan antar badan-badan usaha tersebut di atas.

Kawasan Industri yang dimaksud dalam keppres ini adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Pengusaha Pengelola Industri. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri berlokasi di kawasan industri, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Selain kawasan industri, ada pula istilah zona industri<sup>40</sup> dan kota industri.<sup>41</sup>

Pemda Jawa Barat, dalam rangka pengembangan sektor industri dan mendukung keputusan Presiden mengenai kawasan industri, mengeluarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/SK.629 Bapp/1990 yang berisi mengenai penetapan wilayah seluas 18.000 Ha bagi pembangunan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat. Luas sebaran kawasan industri tersebut yang diperuntukkan bagi 9 kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Serang	3.500 Ha
2. Kabupaten Tangerang	3.000 Ha
3. Kabupaten Bogor	500 Ha
4. Kabupaten Bekasi	3.000 Ha
5. Kabupaten Karawang	5.500 Ha
6. Kabupaten Purwakarta	1.000 Ha
7. Kabupaten Bandung	600 Ha

<sup>40</sup> Daerah industri yang peruntukkannya diizinkan untuk pembangunan dan pengembangan industri

<sup>41</sup> Industri yang dibangun dalam wilayah perkotaan yang umumnya industri yang kurang mengganggu lingkungan dan dalam skala kecil.

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 8. Kabupaten Sumedang | 400 Ha |
| 9. Kabupaten Cirebon  | 500 Ha |

Jika melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada periode keempat ini lahan peruntukkan kawasan industri di Kabupaten Karawang terluas di Provinsi Jawa Barat. Kawasan industri ini kemudian disebut Kawasan Industri Karawang Terpadu (KIKT).<sup>42</sup>

Seperti telah dijelaskan dalam bab pertama, pemilihan Kabupaten Karawang sebagai kawasan industri disebabkan oleh lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan Ibukota Jakarta dan tersedianya prasarana transportasi yang baik. Dalam mendukung kebijakan perekonomian nasional dan regional, pembangunan KIKT di Kabupaten Karawang pada dasarnya dilaksanakan untuk memenuhi beberapa target pembangunan, seperti menunjang kebijakan Pemda Tingkat I Jawa Barat yang telah menunjuk Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah bagi pengembangan kawasan industri dan menciptakan peluang bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan penduduk serta meningkatkan pendapatan daerah.<sup>43</sup>

Pembangunan kawasan industri dimulai dari 18 desa di 2 kecamatan, yaitu 16 desa di Kecamatan Telukjambe dan 2 desa di Kecamatan Cikampek. Pada tahun 1989, sektor industri hanya memanfaatkan lahan seluas 340 hektar kemudian meningkat menjadi 1.504,5 hektar. Hingga bulan Mei 1993, telah terdapat 67 perusahaan yang memperoleh izin lokasi dan pembebasan lahan untuk zona industri seluas ± 822,2 hektar dan sebanyak 17 perusahaan memperoleh izin lokasi pembebasan lahan untuk kawasan industri dengan luas 5.500 hektar.<sup>44</sup>

### 3.3 Kebijakan Perindustrian di Kabupaten Karawang

<sup>42</sup> Agustinus Widanarto. (1994). *Kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten DT II Karawang dalam Menanggapi Lonjakan Pendatang: Laporan Penelitian*. LIPI. Hal. 20.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 23.

<sup>44</sup> Edi Dharma Setiawan. (1996). *Pengaruh konversi Lahan pada Kualitas Hidup Petani (Studi Kasus: Petani Padi Sawah, Kecamatan: Telukjambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 24.

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Karawang, seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, merupakan implementasi dari Keppres Nomor 53 Tahun 1989. Sebelumnya, kegiatan perindustrian di Kabupaten Karawang telah dimulai pada tahun 1983 dengan satu buah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dengan nilai \$(US) 8.130.966,40. Kemudian bertambah menjadi tiga perusahaan pada tahun 1985. Penulis mendapati perbedaan antara pernyataan pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang, laporan penelitian Agustinus Widanarto, dan data BPS. Menurut pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang, pada tahun 1990-an baru dimulai pembebasan lahan. Jika ada kegiatan industri, kegiatan tersebut belum bergerak seintens seperti sekarang dan hanya ada beberapa perusahaan saja. Sedangkan menurut laporan penelitian Agustinus Widanarto, kegiatan perindustrian telah dimulai pada tahun 1992 dan menurut data BPS, sudah ada satu buah perusahaan pada tahun 1983 serta beberapa industri kecil.

Kegiatan perindustrian pada awalnya ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi sebelum terjadi otonomi daerah. Keikutsertaan Pemda Kabupaten Karawang baru dimulai sekitar tahun 2001/2002, yaitu ketika kebijakan otonomi daerah mulai dilaksanakan. Akan tetapi, keikutsertaan ini tidak bersifat menyeluruh. Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang hanya menangani industri dengan investasi di bawah 10 Milyar, sedangkan lebih dari itu, ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.<sup>45</sup>

Menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat industri tampaknya telah dipertimbangkan dengan matang oleh para pengambil kebijakan. Pembangunan kawasan industri diyakini tidak akan mengganggu kegiatan pertanian yang telah berabad-abad menjadi mata pencaharian utama kabupaten ini.<sup>46</sup> Kawasan industri dibangun di bagian selatan kabupaten (Kecamatan Klari, Telukjambe, dan Cikampek

---

<sup>45</sup> Keterangan dari Bpk. Joko Sunaryo, Pegawai Dinas Perindustrian bagian penangan Industri Besar. 25 April 2012.

<sup>46</sup> Kondisi ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Aja Suteja, seorang ketua kelompok tani Sri Jembar. Menurut Bapak Aja, Pemerintah Soeharto memperlakukan sektor pertanian dan perindustrian secara adil hingga dapat berjalan bersamaan. Wawancara pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 13.10.



sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang tahun 1994/1995<sup>47</sup>), seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kurang produktif untuk pertanian bahkan untuk palawija. Sedangkan bagian utara kabupaten yang bertanah subur dan produktif untuk pertanian, tidak akan dijadikan sebagai kawasan industri.

Selain itu, Pemda Kabupaten Karawang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 17 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang berfungsi sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah.<sup>48</sup> Sedangkan jika ditinjau dari kebijakan spasial yang terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang (1989/1990 – 1993/1994), maka Kabupaten Karawang dibagi menjadi 3 wilayah pembangunan (WP), yaitu WP Utara dengan Rengasdengklok sebagai pusat, WP Tengah Selatan dengan Karawang sebagai pusat, dan WP Timur dengan Cikampek sebagai pusat.<sup>49</sup> Pusat di sini adalah pusat pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti pemukiman dan jasa, yang berpotensi untuk menimbulkan pertumbuhan di wilayah-wilayah pembangunan tersebut.

### **3.4 Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Perindustrian**

Suatu kegiatan atau usaha akan berjalan dengan baik dan melaju cepat disebabkan oleh faktor-faktor pendorong, begitu pula dengan kegiatan industri di Kabupaten Karawang. Faktor-faktor pendorong berkembangnya kegiatan perindustrian di Kabupaten Karawang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor pendorong eksternal, yaitu kondisi ekonomi nasional, munculnya negara-negara industri baru (NIB) di Asia, dan terbukanya penanaman

---

<sup>47</sup> Edi Dharma Setiawan.(1996). *Pengaruh konversi Lahan pada Kualitas Hidup Petani (Studi Kasus: Petani Padi Sawah, Kecamatan: Telukjambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 23.

<sup>48</sup> Syahrudin. (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Karawang*. Tesis UI. Hal. 72.

<sup>49</sup> *Loc. Cit.* Hal. 23.

modal asing. Sedangkan faktor-faktor pendorong internal, yaitu letak wilayah, kehidupan ekonomi dan populasi penduduk, dan pada perkembangannya, akan meningkatkan pendapatan daerah. Pada subbab ini hanya akan dijelaskan faktor-faktor pendorong internal, karena faktor-faktor pendorong eksternal telah dijelaskan di awal bab 3.

### **Letak Wilayah**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa letak wilayah Kabupaten Karawang cukup strategis. Posisi Kabupaten Karawang terletak pada jalur antara Jakarta-Bandung dan Jakarta-Jawa Tengah dan jaraknya yang hanya 70 km dari Jakarta serta terdapat jalur bebas hambatan (jalan tol Jakarta – Cikampek-Bandung) menyebabkan kabupaten ini cukup strategis untuk pengembangan sektor industri serta kegiatan ekonomi lainnya.<sup>50</sup> Akses jalan tol ini memudahkan transportasi industri dan memiliki jalur langsung ke pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, investor lebih tertarik lokasi industri yang mendekati ibukota Jakarta, seperti Bekasi, Purwakarta, Bogor, dan Karawang. Investasi di Kabupaten Karawang semakin gencar dimulai pada tahun 1996 karena dianggap sebagai daerah yang lebih menjanjikan untuk kegiatan industri.

### **Kehidupan Ekonomi dan Populasi Penduduk**

Industri, dibandingkan dengan pertanian, menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan luas lahan yang dibutuhkan lebih sempit dan upah lebih besar. Sedangkan, populasi penduduk Kabupaten Karawang setiap tahun bertambah. Pertambahan penduduk Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Karawang  
Tahun 1984-1997

Tahun	Jumlah Penduduk
1984	1,299,669

<sup>50</sup>*Ibid.* Hal. 57.

1985	1,309,186
1986	1,377,151
1987	1,380,118
1988	1,387,591
1989	1,392,317
1990	1,439,460
1991	1,478,378
1992	1,533,114
1993	1,551,016
1994	1,568,212
1995	1,584,715
1996	1,600,516
1997	1,615,614

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dan Dinas Perhutanan Kab. Karawang

Jumlah penduduk yang semakin meningkat, tentu saja, tidak akan dapat ditampung oleh pertanian. Jika melihat tabel, setiap tahun penduduk Karawang mengalami pertambahan sebanyak lebih dari 2000 jiwa, bahkan pada tahun 1990-1997, pertambahan penduduk mencapai lebih dari 15.000 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 1986, yaitu sebanyak 67.965 jiwa dan tahun 1992, yaitu sebanyak 54.736 jiwa. Wajar saja memang terjadi peningkatan sebesar ini, karena rata-rata PDRB per kapita penduduk sudah semakin meningkat juga pada periode 1989-1993.

Tabel 3.2 Rata-rata PDRB Per Kapita di Kabupaten Karawang Tahun 1989-1993  
(Rupiah)

Tahun	PDRB per kapita atas dasar harga	
	Berlaku <sup>51</sup>	Konstan <sup>52</sup>

<sup>51</sup> PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah/wilayah.

1989	695.398	436.447
1990	784.253	465.455
1991	912.513	489.021
1992	1.057.704	515.281
1993	1.250.719	557.624

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Akan tetapi, rata-rata PDRB per kapita bukanlah pendapatan masing-masing penduduk, karena ternyata terdapat sepuluh kecamatan atau 71,43% dari seluruh kecamatan di kabupaten ini memperlihatkan tingkat konsumsi kalori per kapita sehari di bawah rata-rata Kabupaten Karawang, yaitu 2295,95 kalori. Pada tahun 1993, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini diperkirakan mencapai 156.532 orang atau sekitar 10% dari jumlah penduduk.

### **Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan *International Standard for Industrial Classification (ISIC)* yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sektor lapangan usaha terbagi menjadi sebelas sektor. Kesebelas sektor lapangan usaha tersebut, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor sewa rumah, sektor pemerintah dan hankam, dan sektor jasa-jasa. Dari kesebelas sektor tersebut, pengambil peran terbesar dalam ekonomi penduduk adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 32,0% pada tahun 1989. Akan tetapi, laju pertumbuhan sektor pertanian pada periode 1989-1993 mengalami penurunan dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,30%.<sup>52</sup> Laju pertumbuhan sektor pertanian yang lambat menjadi salah satu penyebab mengapa Pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Karawang, memilih

<sup>52</sup> PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang Tahun 1989-1993 Menurut Lapangan Usaha*.

mengembangkan sektor industri. Kabupaten Karawang tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai pendapatan daerah.

### 3.5 Perkembangan Perindustrian di Kabupaten Karawang

Perkembangan perindustrian dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti jumlah perusahaan, jenis-jenis industri, hasil produksi, perkembangan ekspor, laju pertumbuhan, dan peranan dalam kegiatan ekonomi daerah. Industri yang akan dijelaskan dalam subbab ini adalah tipe industri sedang/besar yang bergerak dalam bidang pengolahan dan manufaktur. Menurut Prof. Hasan Poerbo, industri dikelompokkan menjadi empat kategori.<sup>54</sup> Keempat kategori tersebut adalah industri besar dan modern, industri kecil dan tradisional, industri modern yang bergerak bebas di bidang pengolahan dan manufaktur, dan industri pengolahan dan manufaktur. Sedangkan menurut jenis hasil industri, industri di Kabupaten Karawang terbagi menjadi sembilan. Kesembilan jenis hasil industri tersebut, yaitu:

- 1) Industri makan, minuman, dan tembakau;
- 2) Industri tekstil pakaian jadi dan kulit;
- 3) Industri kayu bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga;
- 4) Industri kertas dan bagian dari kertas percetakan dan penerbitan;
- 5) Industri kimia dan barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik;
- 6) Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara;
- 7) Industri logam dasar;
- 8) Industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya;

---

<sup>54</sup> Maturidi Satar. (2002). *Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 37-38.

9) Industri pengolahan lainnya.

Dari kesembilan jenis hasil industri tersebut, industri tekstil pakaian jadi dan kulit memiliki nilai tambah atas harga pasar dan penyerapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan jenis hasil industri lainnya. Menurut Bapak Inta ‘Waker’, pada periode 1990-an, perusahaan tekstil lebih banyak dibandingkan perusahaan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Karawang.<sup>55</sup> Sembilan jenis hasil industri yang telah disebutkan di atas tergabung dalam beberapa perusahaan. Sejak tahun 1989, perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Karawang semakin meningkat. Dari 1 perusahaan pada tahun 1983 menjadi 8 perusahaan pada tahun 1989 dan 14 perusahaan pada tahun 1990 yang bernilai \$ (US) 74.614.436,58 dengan persentase perubahan nilai 77,06% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah perusahaan industri di Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Karawang Tahun 1992-1998 Diperinci Menurut Jenis Fasilitas

Tahun	Jenis Industri			Total
	PMA	PMDN	Non-Fasilitas	
1992	12	45	20	77
1993	16	49	24	89
1994	21	62	34	117
1995	40	73	55	168
1996	121	155	59	335
1997	142	159	68	369
1998	150	159	68	377

Banyaknya perusahaan mendorong permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat, karena industri dalam pelaksanaan operasinya membutuhkan sumber

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Inta “Waker” pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 17.35.

daya manusia selain sumber daya alam. Kondisi ini sesuai dengan harapan Pemerintah, yaitu industri dapat mengatasi masalah pengangguran.

Tabel 3.4 Banyaknya Tenaga Kerja Industri Sedang/Besar Tahun 1988-1997

Tahun	Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
1988	2.797	976	3.773
1990	8.099	2.596	10.695
1991	9.467	2.042	11.509
1993	23.712	4.195	27.907
1994	20.172	3.706	23.878
1995	23.028	3.939	26.967
1996	26.015	4.283	33.397
1997	27.746	4.579	32.326

Sumber: Badan Pusat Statistik

Semakin intensnya kegiatan industri di Kabupaten Karawang menyebabkan peranan industri dalam perekonomian kabupaten ini meningkat. Pada tahun 1993, persentase peranan sektor industri dalam perekonomian Kabupaten Karawang sebesar 27,56% dari 21,81% pada tahun 1989. Persentase peranan ekonomi ini menggeser sektor pertanian dari 32,03% pada tahun 1989 menjadi 26,30% pada tahun 1990. Sedangkan persentase rata-rata laju pertumbuhan pada periode 1989-1993 sebesar 15,47%. Angka ini mengalahkan sektor pertanian yang memiliki persentase rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,30% pada periode yang sama. Perbandingan laju pertumbuhan kedua sektor yang menunjukkan aktivitas ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Tahun 1989-1998 (%)

Tahun	Sektor Industri	Sektor Pertanian
-------	-----------------	------------------

1989	16,31	3,59
1990	17,77	-2,16
1991	12,64	2,01
1992	11,18	-1,49
1993	16,94	4,53
1997	5,08	-0,47
1998	-23,32	-11,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Data ini didukung oleh PDRB sektor industri yang semakin meningkat dimulai tahun 1993, yaitu sebesar 22,69%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian pada tahun yang sama, yaitu 13,77%. Akan tetapi, jika melihat tabel di atas, perindustrian di Kabupaten Karawang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dimulai pada tahun 1997. Padahal pada periode 1993-1997, struktur ekonomi Kabupaten Karawang dikuasai oleh sektor industri. Akan tetapi, pada tahun 1998, peranan sektor ekonomi dalam peranan struktur ekonomi mengalami penurunan dari 31,95% menjadi 30,47%. Penurunan laju pertumbuhan dan peranan dalam struktur ekonomi disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Bahkan inflasi sektor industri meningkat dari 3,42% pada tahun 1997 menjadi 69,75% pada tahun 1998.

Seperti yang telah diuraikan, sektor industri menguasai struktur ekonomi Karawang yang notabene kota lumbung padi. Tentu saja kondisi ini akan berpengaruh pada struktur masyarakat pertanian yang telah dibangun sejak lama, karena industri, khususnya industri besar, merupakan kegiatan ekonomi yang jauh berbeda dari kegiatan ekonomi masyarakat Karawang.



**BAB IV**

**PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP KEHIDUPAN  
MASYARAKAT PETANI KABUPATEN KARAWANG**

**4.1 Pengaruh Industrialisasi terhadap Masyarakat Petani di Daerah Sekitar  
Kawasan Industri**

Industrialisasi merupakan kegiatan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat Karawang sebelumnya, yakni pertanian. Seperti banyak diuraikan oleh para pakar sejarah, masuknya sistem baru pada suatu masyarakat, sedikit banyak akan direspon oleh masyarakat tersebut, sesuai dengan kerangka pemikirannya terhadap kenyataan yang dihadapinya. Dalam bab ini penulis mencoba untuk mengungkapkan, bagaimana dampak perindustrian itu terhadap kehidupan masyarakat petani Karawang, serta bagaimana tanggapan mereka terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan mereka sebagai dampak perindustrian tersebut.<sup>56</sup> Terdapat tiga ukuran terjadinya perubahan menurut Pearce<sup>57</sup>, yaitu perubahan dalam dimensi ekonomi, dimensi struktural, dan dimensi kultural. Perubahan pada dimensi ekonomi yaitu perubahan penghasilan dari ikatan kekeluargaan ke perusahaan yang sebagian besar dependen pada pemasukan industri. Perubahan pada dimensi struktural yaitu perubahan keanggotaan yang hanya masyarakat sekitar menjadi keanggotaan masyarakat yang bersifat nasional. Kemudian perubahan pada dimensi kultural yaitu terjadinya perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi heterogen dengan adanya bermacam-macam suku bangsa dan budaya.

Di Karawang, perubahan dimensi ekonomi terjadi pada perubahan pola penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri merupakan

---

<sup>56</sup> Andrew Pearce dalam Teodor Shanin (Penyunting). (1976). *Peasants and Peasant Society*. New Zealand: Penguin Books Ltd. Hal. 70-71.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 79.

salah satu contoh dari perubahan pola penggunaan lahan. Terdapat 4 kecamatan yang dikhususkan untuk kawasan industri pada tahun 1996, yaitu Kecamatan Telukjambe, Cikampek, Klari, dan Karawang. Pada tahun 1996, di Kecamatan Telukjambe telah terjadi pembebasan lahan untuk kawasan industri seluas ±5.500 hektar dan zona industri seluas ±450 hektar, di Cikampek terdapat kawasan industri seluas ±1000 hektar dan zona industri ±150 hektar, di Karawang dan Klari diperkirakan terdapat masing-masing zona industri seluas ±30 hektar dan ±270 hektar.<sup>58</sup> Pada tahun 1998, luas sawah yang dikonversi menjadi areal industri telah mencapai 10.607 hektar.

Para petani menjual sawahnya kepada para investor disebabkan oleh sawah yang mereka miliki merupakan sawah tidak produktif. Sawah tidak produktif tentu saja tidak menghasilkan produksi yang mencukupi padahal kebutuhan semakin bertambah. Sedangkan jika menjual pada para investor, para petani mendapatkan uang ganti rugi yang cukup besar dan para petani mendapatkan kesempatan berusaha di sektor lainnya. Besar uang ganti rugi dan jumlah petani yang menjual tanahnya di dua desa di Kecamatan Telukjambe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Perolehan Uang Ganti Rugi Petani pemilik lahan yang menjual lahannya Tahun 1993 di Desa Purwadana dan Telukjambe Kecamatan Telukjambe<sup>59</sup>

Besarnya Uang Ganti Rugi (Juta rupiah)	Petani Pemilik Lahan yang Menjual Lahannya			
	Purwadana		Telukjambe	
	KK	%	KK	%
<25	16	26,67	21	35,00
25-50	15	25,00	17	20,33
50-75	16	26,67	14	23,33
75-100	8	13,33	5	8,33
<100	5	8,33	3	5,00

<sup>58</sup> Edi Dharma Setiawan. (1996). *Pengaruh Konversi Lahan pada Kualitas Hidup Petani (Studi Kasus Petani Padi Sawah Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang)*. TESIS UI. Hal. 49.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 59.

Jumlah	60	100,00	60	100
--------	----	--------	----	-----

Para petani yang mendapatkan uang ganti rugi ini mendapat kesempatan untuk membeli sawah di daerah lain, seperti di Kecamatan Tempuran, Rengasdengklok, Tempuran, Pedes, Rawamerta, dan Batujaya. Para petani mendapatkan keuntungan lebih besar, karena selain tanahnya lebih subur, harganya pun relatif lebih murah. Harga lahan usaha tani tersebut berkisar antara Rp 3.500 sampai dengan Rp 7.500 per m<sup>2</sup>. Oleh karena harga yang relatif murah, para petani dapat membeli dua kali lipat atau lebih dari luas sawah yang mereka jual. Walau demikian, tidak semua petani membeli sawah di daerah lain, karena mendapatkan sawah yang dijual biasanya cukup lama hingga uang ganti rugi terpakai dan tidak mencukupi untuk membeli sawah.<sup>60</sup> Para petani yang tidak membeli sawah lagi setelah mendapatkan uang ganti rugi mengubah matapencariannya sebagai pedagang, jasa angkutan, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian Setiawan yang membandingkan antara petani pemilik lahan di tiga desa di Telukjambe yang menjadi kawasan industri dan belum menjadi kawasan industri mendapati bahwa petani yang menjual tanahnya memiliki pendapatan tambahan lebih besar dibandingkan petani yang tidak menjual tanah. Hasil penelitian Setiawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Pendapatan per Kapita Responden per Tahun (1993)<sup>61</sup>

Sumber Pendapatan	Petani Pemilik Lahan yang Menjual Lahannya		Rata-rata Pendapatan	Petani Pemilik Lahan di Desa Pinayungan
	Purwadana	Telukjambe		
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Utama	450.250	425.500	437.875	285.750
Tambahan	275.500	243.500	259.500	157.650

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal. 91.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 62.

Rata-rata	587.132	563.967	575.500	370.230
-----------	---------	---------	---------	---------

Petani yang menjual tanahnya mendapatkan penghasilan utama lebih besar dibandingkan dengan petani yang tidak menjual tanahnya karena mereka mendapatkan tanah yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jika sawah yang mereka beli jaraknya jauh dari tempat tinggal, biasanya mereka menyakapkan pada petani di daerah sekitar sawah tersebut. Dengan demikian, para petani ini pun berkesempatan untuk mencari pendapatan di bidang lain, seperti perdagangan. Seperti tabel di atas, petani yang menjual tanahnya memiliki pendapatan tambahan lebih besar dibandingkan petani yang tidak menjual tanahnya. Pendapatan tambahan ini didapatkan para petani dengan cara berdagang, membuka rumah indekos, atau pekerjaan lainnya.

Para petani lebih banyak memilih untuk berdagang. Kebanyakan mereka mendagangkan makanan dan minuman. Alasan mereka berdagang adalah Telukjambe semakin bertambah ramai dan mereka berpikir bahwa jika mereka berdagang, banyak orang yang akan membeli barang dagangan mereka.<sup>62</sup> Mereka yang membuka usaha dagang biasanya mereka yang tidak bisa melamar pekerjaan di sektor industri karena pendidikan rendah. Kondisi ini lah yang menyebabkan perindustrian berakibat pada semakin pesatnya sektor-sektor ekonomi informal.<sup>63</sup> Pada perkembangannya, di kecamatan-kecamatan yang dikhususkan untuk areal industri, sektor-sektor informal mulai meramaikan bukan hanya daerah ini tapi juga Karawang secara luas. Kondisi ini seperti yang digambarkan oleh Sethuraman dalam Manning dan Noer. Menurut Sethuraman, sektor informal muncul karena pada

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Euis Nurhayati pada hari Jumat, 18 Mei 19.00.

<sup>63</sup> Maturidi Satar. (2002). *Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 63.

umumnya yang terlibat dalam sektor ini adalah mereka yang miskin, berpendidikan sangat rendah, dan tidak terampil.<sup>64</sup>

Para petani atau keluarganya yang memiliki pendidikan cukup tinggi, mereka melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Pada masa awal industrialisasi, pelamar kerja berijazah SD masih dapat diterima.<sup>65</sup> Kemudian, semakin berkembangnya perindustrian dan pemakaian alat-alat berteknologi tinggi, perusahaan-perusahaan memberikan kualifikasi yang lebih tinggi. Pada awalnya pekerja berijazah SMP masih diterima, lalu pada tahun 1996-an, hanya pekerja dengan ijazah SMA dan sederajat yang diterima. Kualifikasi ini terus meningkat, bahkan pada tahun 2000-an, pelamar pekerja dengan ijazah SMA berumur di atas 30 tahun tidak akan diterima. Adanya kualifikasi ini menyebabkan Karawang tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja, padahal kawasan industri seluas 5.500 hektar diperkirakan akan menyedot tenaga kerja sebesar 1.100.000 orang.<sup>66</sup> Pada awalnya, 90% kesempatan kerja dikhususkan bagi penduduk asli<sup>67</sup> kemudian menjadi  $\pm 30\%$  atau sekitar 275.000 orang penduduk asli.<sup>68</sup> Ketidakmampuan Karawang memenuhi kebutuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Karawang masih rendah. Pada tahun 1993, hanya 4,88% penduduk yang menamatkan sekolah hingga SMA dan mengalami kenaikan sebesar 1,55% pada tahun 1996. Persentase penduduk karawang menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Kab. Karawang Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 1993 dan 1996

Tingkat Pendidikan	1993 (usia 5 tahun ke	1996 (usia 10 tahun ke
--------------------	-----------------------	------------------------

<sup>64</sup> Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (Peny.). (1985). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT Gramedia. Hal. 90.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Inta "Waker" pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 17.35.

<sup>66</sup> Agustinus Widanarto. (1994). *Kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten DT II Karawang dalam Menanggapi Lonjakan Pendatang: Laporan Penelitian*. LIPI. Hal. 34.

<sup>67</sup> Maturidi Satar. (2002). *Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 60.

<sup>68</sup> *Loc. Cit.* Hal. 34.

	atas)	atas)
Tidak/belum pernah sekolah	26,78	16,40
Tidak tamat SD	41,81	32,75
SD	20,78	34,86
SLTP dan sederajat	5,46	8,53
SLTA dan sederajat	4,88	6,43
D 1 - D 3	0,24	0,51
Universitas	0,05	0,52
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data di atas membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Karawang masih berpendidikan rendah dan Karawang tidak mampu menghadapi perubahan yang terjadi. Ketidakmampuan Karawang untuk memenuhi kebutuhan industri ini kemudian dipenuhi oleh tenaga kerja-tenaga kerja dari luar Karawang. Para tenaga kerja ini kemudian menetap permanen dan sementara di Karawang. Arus migrasi penduduk dari luar Karawang semakin besar. Kondisi ini disebabkan oleh tenaga kerja yang telah menetap di Karawang kemudian membawa kerabatnya.<sup>69</sup> Arus migrasi penduduk masuk ke Karawang ini lah yang dinamakan perubahan pada dimensi struktural. Adanya migrasi penduduk menyebabkan penduduk semakin sulit untuk saling mengenal dan semakin tingginya individualisme antar sesama tetangga. Tenaga kerja yang tidak menetap di Karawang atau pulang pergi, mereka membutuhkan alat transportasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan frekuensi angkutan bus antar kota, terutama jurusan Jakarta – Karawang semakin tinggi. Sebaliknya, tenaga kerja yang menetap membutuhkan tempat tinggal dan akomodasi yang memadai. Oleh karena itu, seperti telah disebutkan sebelumnya, banyak dibuka rumah indekos dan warung-warung.

<sup>69</sup> *Ibid.* Hal. 35.

Perubahan pada dimensi kultural juga disebabkan oleh urbanisasi. Komposisi masyarakat Karawang yang mayoritas bersuku sunda dan sebagian kecil bersuku jawa di Kecamatan Cilamaya, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi bermacam-macam suku bangsa. Tapi, untuk masalah perbedaan suku bangsa, sebagian besar masyarakat tidak merasakan perbedaan karena pendatang biasanya dapat beradaptasi. Selain itu, sebagian besar pendatang menggunakan bahasa yang sama dengan penduduk asli, Bahasa Sunda, sehingga merasa masih merupakan saudara sendiri.<sup>70</sup>

Pengaruh industrialisasi, tentu saja, bukan hanya pengaruh sosial dan ekonomi, tapi juga masalah lingkungan hidup yang akan berpengaruh pada masalah ekonomi. Sebagian besar petani merasakan bahwa telah terjadi pencemaran di lingkungan mereka, seperti pencemaran udara, gangguan kebisingan, dan pencemaran air di sungai-sungai oleh limbah industri. Pencemaran air sangat bermasalah bagi para petani, karena selain memanfaatkan hujan untuk pengairan, petani juga memanfaatkan sungai. Jika sungai tercemar, maka sawah pun akan tercemar dan akan mengakibatkan masalah-masalah seperti gagal panen atau sawah tidak dapat diolah lagi.

Pada masa awal industrialisasi, lonjakan penduduk belum begitu terasa oleh masyarakat, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali karena migrasi terjadi secara berangsur-angsur.<sup>71</sup> Walaupun apa yang dikatakan Eric R. Wolf mengenai krisis demografi<sup>72</sup> menjadi salah satu faktor keterlibatan petani dalam politik belum begitu terlihat. Seperti telah disebutkan di atas, para petani menjual tanahnya, membeli tanah di daerah lain atau mengganti mata pencaharian utamanya. Akan tetapi, perubahan ini tidak menyebabkan konflik lebih jauh antara penduduk asli, pendatang, dan perusahaan-perusahaan. Konflik atau persaingan antar penduduk asli

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Hal.69.

<sup>71</sup> *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Krisis demografi merupakan salah satu faktor penyebab keterlibatan petani dalam politik. Krisis demografi terjadi karena meningkatnya populasi masyarakat yang akan menimbulkan ketegangan dalam susunan warisan budaya. (Shanin, 1976, p. 256)

dan pendatang hanya masalah kesempatan kerja. Penduduk asli memang menyadari bahwa kesempatan kerja terbuka bagi siapa saja, tapi karena segi pendidikan (mayoritas penduduk berpendidikan rendah), usia, dan pandangan seseorang menyebabkan terjadinya persepsi 'tidak ada kesempatan kerja'.<sup>73</sup>

Namun, pada tahun 2000-an ketika industri lebih pesat dibanding sebelumnya, mulai terjadi ketegangan-ketegangan antara para petani, perusahaan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Para petani merasa bahwa Pemerintah tidak serius dalam membatasi konversi lahan pertanian yang terus terjadi, hingga menyebabkan para petani merasa tergesur. Sedangkan konflik petani dengan perusahaan terjadi karena masalah penguasaan tanah secara ilegal, seperti yang terjadi antara petani di tiga desa di Kecamatan Telukjambe dengan PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP).<sup>74</sup> Bukan hanya masalah penguasaan ilegal, tapi juga petani Karawang berharap Pemerintah dapat menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan industri. Masalah alih fungsi ini banyak dibahas di beberapa media massa di internet, seperti [www.pelitakarawang.com](http://www.pelitakarawang.com) yang beberapa kali membahas mengenai alih fungsi lahan pertanian di Karawang.

#### **4.2 Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa menjadikan Kabupaten Kawang sebagai salah satu kawasan industri telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pemda Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagian selatan Karawang dijadikan sebagai kawasan industri karena lahan kritis yang tidak produktif untuk pertanian. Sedangkan kawasan industri tidak akan dibangun di bagian utara Karawang yang dikhususkan untuk pertanian. Hingga kini pun, Karawang bagian utara tidak tersentuh oleh pembangunan kawasan industri. Beberapa zona industri

---

<sup>73</sup> Maturidi Satar. (2002). *Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI. Hal. 57.

<sup>74</sup> Ribuan Petani Karawang Tuntut Pembebasan Lahan. 13 Maret 2012. <http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/120313170758/limit/0/Ribuan-Petani-Karawang-Tuntut-Pembebasan-Lahan.html>.



memang dibangun, tapi tidak sepesat di Telukjambe, Klari, Cikampek, dan Karawang.

Kecamatan Lemahabang merupakan salah satu kecamatan di daerah pertanian. Letaknya cukup dekat dengan Kecamatan Cikampek, yaitu sekitar 30 menit perjalanan menggunakan motor dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Klari. Sebagian besar penduduk Lemahabang bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang. Pada masa awal industrialisasi, bisa dikatakan bahwa Lemahabang belum memperlihatkan pengaruh dari keramaian dari kecamatan tetangganya. Berbeda dengan Telukjambe, Klari, dan Cikampek, komposisi petani pemilik, petani pemilik penggarap, petani penggarap, dan buruh tani di Kecamatan Lemahabang tidak mengalami perubahan sama sekali pada periode 1989-1997. Komposisinya, yaitu 482 KK petani pemilik, 3.357 KK petani pemilik penggarap, 3.358 petani penggarap, 13.600 buruh tani.<sup>75</sup> Lemahabang, walaupun letaknya cukup dekat dengan Cikampek, tidak mengalami konversi lahan sawah untuk pemukiman bahkan sejak tahun 1993, luas lahan sawah tidak berubah sama sekali, yaitu seluas 3.798 hektar. Tidak adanya perubahan pada komposisi petani dan luas lahan sawah tersebut membuktikan bahwa industrialisasi hampir tidak berpengaruh pada kegiatan pertanian di Kecamatan Lemahabang. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), peranan Lemahabang dalam sektor industri (sedang/besar dan kecil/rumah tangga) hanya 6,26%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian (30,86%). Bahkan di bidang industri sedang/besar, yang sedang berkembang pada masa itu, Lemahabang hanya menyumbang sebesar 0,22% pada tahun 1992 pada Karawang. Kondisi di Kecamatan Lemahabang tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Telagasari (industri sedang/besar 1,45%) dan Tirtamulya (industri sedang/besar 0,00%) padahal ketiga kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Klari dan Cikampek.<sup>76</sup> Perbandingan peranan dan distribusi PDRB

---

<sup>75</sup> *Laporan Tahunan*. Dinas Pertanian dan Perhutanan Kabupaten Karawang.

<sup>76</sup> Kantor Statistik BPS Kab. Karawang. *Studi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang 1992-1993: Kecamatan*.

Kecamatan Tirtamulya, Telagasari, dan Lemahabang dengan Telukjambe, Klari, dan Cikampek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di 6 Kecamatan di Karawang Tahun 1992

Sektor Usaha	Klari	Telukjambe	Cikampek	Tirtamulya	Telagasari	Lemahabang
<b>Pertanian</b>	<b>10,56</b>	<b>32,06</b>	<b>17,63</b>	<b>39,67</b>	<b>34,68</b>	<b>32,59</b>
Tanaman	9,71	27,08	16,08	36,63	30,82	30,98
Bahan Lain-lain	0,85	5,02	1,55	3,04	3,86	1,61
<b>Industri</b>	<b>70,36</b>	<b>45,23</b>	<b>36,06</b>	<b>4,71</b>	<b>4,23</b>	<b>6,14</b>
Pengolahan Ind.Besar& Sedang	69,88	43,74	35,17	1,45	0,00	0,22
Ind.Kecil& Rmt	0,49	1,49	0,90	3,25	4,23	5,92

Sumber: Kantor Statistik BPS Kab. Karawang

Tidak adanya pengaruh industri bukan hanya di Kecamatan Lemahabang, tapi hampir seluruh kecamatan di bagian utara Karawang, seperti Tirtamulya dan Telagasari. Kedua kecamatan ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam sektor pertanian untuk pendapatan daerah. Padahal, letak kedua kecamatan ini pun berdekatan dengan kecamatan yang dijadikan sebagai kawasan industri. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tidak akan melakukan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri di bagian utara.

Selain tidak begitu berpengaruh pada kegiatan pertanian, para petani Lemahabang tidak bekerja di industri karena faktor pendidikan. Persyaratan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan mengenai latar belakang pendidikan membuat para petani tidak berani mencoba melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Memang penduduk di Lemahabang sebelum tahun 1998 belum berpendidikan tinggi, mayoritas hanya berijazah SD dan Sekolah Rakyat atau tidak lulus SD atau tidak bersekolah sama sekali, sedangkan yang memiliki berijazah SMP dan SMA sangat sedikit. Jarang ditemukan penduduk berijazah SMA dan sederajat

akan bekerja sebagai petani, karena mereka yang berpendidikan tinggi biasanya memilih bekerja menjadi pegawai pemerintah atau pekerjaan yang lebih baik dibandingkan bertani.

Selain masalah rendahnya pendidikan, kurangnya minat masyarakat petani Lemahabang terhadap sektor industri karena panggilan hatinya untuk tetap bertani. Mereka tidak melihat sektor perindustrian sebagai sesuatu yang lebih mudah atau lebih menjanjikan daripada pertanian. Justru dalam pikirannya, bagaimana jika mereka tidak bekerja sebagai petani.<sup>77</sup> Jumlah penduduk desa Lemahabang yang bekerja di sektor perindustrian waktu itu, jika dibandingkan dengan sepuluh tahun terakhir (tahun-tahun awal abad ke-21), jumlahnya sangat sedikit. Umumnya yang memilih bekerja di sektor industri karena tidak memiliki sawah untuk bertani dan tentu saja, mereka memiliki ijazah yang memadai. Bapak Asep Saefudin, misalnya, memilih bekerja di industri karena dua alasan yang telah diuraikan di atas.

Bapak Asep berasal dari keluarga petani, karena alasan tertentu, orangtuanya menjual sawah hingga mereka tidak memiliki sawah lagi. Bapak Asep berpendapat bahwa bekerja di sektor pertanian tidak memiliki banyak keuntungan seperti bekerja di sektor industri atau sektor perdagangan. Menurutnya, pertanian tidak membawa keuntungan besar, terlebih jika mengalami kegagalan panen.<sup>78</sup> Bapak Ihsan memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Asep, menurutnya bertani seperti “menggali lubang tutup lubang”. Ketika panen gagal, para petani berhutang untuk modal musim tanam berikutnya. Kemudian ketika panen berhasil, hasil panen akan dipakai untuk menutupi hutang. Padahal, hidup dari sektor pertanian tidak menentu. Petani tidak mengetahui kapan mereka akan mengalami keberhasilan dan kegagalan panen.<sup>79</sup> Walaupun demikian, Bapak Ihsan memilih terus bertani, tidak seperti Bapak Asep.

Bapak Ihsan memilih untuk tetap bertani karena, seperti telah dijelaskan di atas, panggilan hatinya dan tidak tahu bagaimana jika ia tidak bertani. Akan tetapi, Bapak

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Jasim dan Bapak Basri pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 08.30.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Saefudin pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 17.00.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Ihsan pada hari Jumat, 18 Mei 2012 pukul 08.00.

Ihsan, seperti petani lainnya di Kecamatan Lemahabang, berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat yang paling tinggi, minimal SMA. Para petani menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan bahwa dengan sekolah tinggi, mereka akan mengubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik.

Pengaruh industrialisasi di Kecamatan Lemahabang baru terasa sekitar tahun 2000. Sebagian besar masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa pendidikan sangat penting, walaupun pada umumnya mereka hanya mampu bersekolah hanya sampai tingkat SMA. Bersekolah hingga jenjang SMA merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Apalagi bagi orang-orang yang berasal dari keluarga subsisten. Bagi mereka yang telah lulus SMA, bekerja di *pete*<sup>80</sup> menjadi tujuan utama karena bekerja di sektor industri menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pertanian. Selain itu, bagi remaja di Lemahabang, bekerja di sektor industri lebih memiliki prestise tersendiri. Bekerja di sektor pertanian menurut mereka kotor, bau, dan memalukan.<sup>81</sup>

Anggapan bekerja di industri lebih baik dibandingkan pertanian ini terbukti dari semakin bertambahnya pekerja industri. Pada tahun 1996, menurut Pak Asep tidak begitu banyak yang bekerja di sektor industri. Tapi pada tahun 2000, sektor industri telah mengambil tempat di masyarakat terbukti dari jumlah orang yang bekerja di industri sebanyak 2.171 orang. Dengan jumlah lebih dari 2.000 orang, sektor industri menduduki tempat ke empat setelah sektor pertanian (6.315 orang), sektor perdagangan (4.379 orang), dan jasa (4.038).<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Pete* yang dimaksud di sini adalah PT (Peseroan Terbatas). *Pete* adalah sebutan masyarakat Karawang untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di Karawang.

<sup>81</sup> Pengamatan penulis sejak tanggal 6 – 20 Mei 2012.

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Karawang. *Kecamatan Lemahabang dalam Angka Tahun 2000*.

## BAB V

### KESIMPULAN

Petani tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sebuah negara, karena petani berperan penting dalam ketahanan pangan dan stabilitas negara. Jika masalah pangan dapat diatasi, maka keadaan perpolitikan negara pun akan stabil. Hal ini disadari oleh Pemerintah Orde Baru ketika permasalahan pangan melanda tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, Soeharto menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan perbaikan pembangunan ekonomi nasional.

Aplikasi dari kebijakan pangan Soeharto adalah adanya BIMAS (Bimbingan Massal). Karawang, yang memiliki julukan 'kota lumbung padi', dijadikan lokasi Pilot Proyek BIMAS. Pada kelanjutannya, Karawang menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Jawa Barat dan ikut membawa Indonesia menuju swasembada pangan tahun 1985.

Akibat kondisi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh resesi dunia sejak tahun 1983 dan anjloknya harga minyak bumi di pasaran dunia pada tahun 1986/1987, Pemerintah Orde Baru melakukan deregulasi kebijakan perekonomian. Deregulasi ini mencakup berbagai sektor dalam perekonomian, seperti sektor moneter dan sektor riil. Adanya deregulasi ini berdampak cukup besar bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah meminimalisir subsidi pupuk, bahkan harga pupuk berkali-kali naik. Harga pupuk ditekan sedemikian rupa sampai sesuai dengan *real cost*-nya.

Selain itu, Pemerintah juga mulai mengalihkan pandangannya dari pertanian ke perindustrian karena lebih menjanjikan bagi pendapatan negara. Maka, pada tahun 1989, dikeluarkan Keppres Nomor 53 mengenai kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon keppres tersebut dengan mengeluarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/SK.629 Bapp/1990. SK ini berisi mengenai luas lahan

peruntukkan kawasan industri di 9 kabupaten, salah satunya Kabupaten Karawang dengan luas 5.500 hektar.

Akibat Pemerintah Orde Baru lebih memusatkan perhatian terhadap industri, pertanian Indonesia mulai mengalami kemerosotan. Swasembada yang telah dicapai pada tahun 1985 tidak dapat bertahan lama dan Indonesia kembali mengimpor beras. Karawang sebagai salah satu kota lumbung padi pun dijadikan sebagai salah satu kawasan industri.

Jika tidak ada peraturan yang jelas, lahan pertanian akan dibabat habis oleh industri. Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memutuskan bahwa kawasan industri akan dipusatkan di bagian selatan Karawang karena sawah di bagian tersebut tidak produktif untuk pertanian atau sawah yang memanfaatkan hujan sebagai pengairan. Hingga saat ini (tahun 2012), perindustrian masih dipusatkan di bagian selatan Karawang, yaitu Kecamatan Klari, Telukjambe, Karawang Barat, dan beberapa zona industri di Ciampel dan Pangkalan. Sedangkan pertanian dipusatkan di bagian utara karena datarannya cukup rendah dan tanahnya yang subur. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersungguh-sungguh untuk menjadikan pertanian dan perindustrian berkembang bersamaan di Karawang.

Adanya peralihan potensi lahan pertanian bukan saja berdampak pada masalah lingkungan hidup, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi masyarakat Karawang, khususnya para petani. Para petani menjual sawah-sawahnya dan mengganti mata pencahariannya menjadi pekerja pabrik, pedagang, dan sebagainya. Migrasi penduduk dari luar masuk ke Karawang menyebabkan sektor-sektor informal mulai tumbuh dan berkembang. Urbanisasi ini disebabkan oleh banyaknya permintaan tenaga kerja dari sektor industri sedangkan sumber daya manusia di Karawang tidak memadai.

Kondisi demikian terjadi di bagian selatan Karawang. Sebaliknya, di bagian utara Karawang masih belum tersentuh oleh industrialisasi dan pengaruhnya. Bahkan di Kecamatan Lemahabang, tidak terjadi perubahan komposisi petani pemilik, petani pemilik penggarap, petani penggarap, dan buruh tani sejak tahun 1989 hingga tahun 1998. Perubahan baru didapati sekitar tahun 2000-an, ketika perekonomian nasional mulai stabil dan perindustrian kembali berjalan dengan baik di Karawang. Pengaruh industrialisasi begitu terasa sekarang, bahkan mayoritas penduduk menganggap bekerja di pabrik sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA dan sederajat pasti akan mengarahkan tujuannya untuk bekerja di sektor industri.

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Akan tetapi, penguasaan oleh para pemilik tanah semakin terasa. Misalnya, sebuah keluarga besar memiliki tanah berpuluh hektar dengan nama yang berbeda-beda. Sedangkan mayoritas petani penggarap dan buruh tani rata-rata berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini membuktikan bahwa para pemuda di Kecamatan Lemahabang sudah menganggap bahwa pertanian tidak dapat membawa mereka pada kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Cabang Perwakilan Badan Pusat Statistik, Kantor Statistik Kabupaten Karawang. *Karawang dalam Angka Tahun 1988*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1989*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1991*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1993*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1994*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1996*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1997*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Karawang dalam Angka Tahun 1998*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- , *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang Tahun 1989-1993 Menurut Lapangan Usaha*.
- , *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang Tahun 1994-1998 Menurut Lapangan Usaha*.
- , *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karawang: Hasil Survey Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang 1993*.
- , *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karawang: Hasil Survey Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang 1996*.
- , *Studi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang 1993: Kecamatan*.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang. *Laporan Tahunan 1985*.



- . *Laporan Tahunan 1986.*
- . *Laporan Tahunan 1987.*
- . *Laporan Tahunan 1989.*
- . *Laporan Tahunan 1990.*
- . *Laporan Tahunan 1991.*
- . *Laporan Tahunan 1992.*
- . *Laporan Tahunan 1993.*
- . *Laporan Tahunan 1994.*
- . *Laporan Tahunan 1995.*
- . *Laporan Tahunan 1996.*
- . *Laporan Tahunan 1997.*
- . *Laporan Tahunan 1998.*

#### **Dokumen yang Diterbitkan**

- Keppres Nomor 53 Tahun 1989.
- Keppres Nomor 98 Tahun 1993.
- Keppres Nomor 41 Tahun 1996.

#### **Wawancara**

- Basri. (18 Mei 2012)
- Ihsan. (18 Mei 2012)
- Inta 'Waker'. (17 Mei 2012)
- Jasim. (18 Mei 2012)
- Nurhadi, Dedi. (8 Maret 2012)
- Nurhayati, Euis. (18 Mei 2012 dan 17 Juni 2012)
- Rohaeti. (6 Mei 2012)
- Rokayah, Engkay. (19 Mei 2012)
- Saefudin, Asep. (18 Mei 2012)

Suteja, Aja. (18 Mei 2012)

Oyo. (18 Mei 2012)

Usep. (19 Mei 2012)

### Artikel

Bujono, Bambang. *Kita dan Beras*. Majalah TEMPO, Edisi 16 November 1985. Dipublikasikan kembali di <http://tempo.online.com> dan diunduh pada hari Rabu, 13 April 2011 pukul 9:47.

Prof. DR. Ir. Widjang H. Sisworo. *Revolusi Hijau dan Swasembada Beras*. Dipublikasikan kembali oleh KerSip Open Source, 7 Maret 2011. Diunduh pada 7 Mei 2011.

Widanarto, Agustinus. (1994). *Kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten DT II Karawang dalam Menanggapi Lonjakan Pendatang: Laporan Penelitian*. LIPI.

### Buku

Arifin, Bustanil. (1994). *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).

----- (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Bechtold, Karl Heinz W. (Penyunting). (1988). *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Beddu, Amang. (1999). *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. Bogor: IPB Press.

----- (1995). *Sistim Pangan Nasional*. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.

Booth, Anne dan Peter McCawley (Peny.). (1981). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

De Vries, Egbert. (1985). *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Geertz, Clifford. (1976). *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhatara K.A.

Effendi, Tadjuddin Noer. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Hafsah, Dr. Ir. Mohammad Jafar. (2006). *Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Hardjono, Joan. (1990). *Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutabarat, Arifin. (1974). *Mengatasi Krisis Beras (Seri Berita dan Pendapat)*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi (Peny.). (1985). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT Gramedia
- Mubyarto. (1983). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Rahardjo, M. Dawam. (1990). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI-Press.
- Ruman, Yustinus Suhardi. (2003). *Hubungan antara Industrialisasi dan Pembangunan Kawasan Industri dengan Perubahan Otonomi Perempuan dalam Keluarga pada Masyarakat Agraris Karawang*. Tesis UI.
- Sajogyo dan Willian L. Collier (Penyunting). (1986). *Budidaya Padi di Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. (1992). *Sosiologi Pedesaan (Kumpulan Bacaan Jilid II)* Cetakan ke-9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satar, Maturidi. (2002). *Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI.
- Scott, James C. (1981). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, Edi Dharma. (1996). *Pengaruh Konversi Lahan pada Kualitas Hidup Petani (Studi Kasus Petani Padi Sawah Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang)*. Tesis UI.
- Shanin, Teodor (Penyunting). (1976). *Peasants and Peasant Society*. New Zealand: Penguin Books Ltd.
- Syahrudin. (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Karawang*. Tesis UI.
- Thee Kian Wie. (1994). *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES.

## Lampiran 1

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****A. Sasaran**

- 1) Buruh tani
- 2) Petani pemilik
- 3) Petani penggarap
- 4) Pekerja industri

**B. Data Pribadi Responden**

- Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Status :
- Jumlah tanggungan :
- Latar belakang pendidikan:
- Memiliki sawah atau tidak. Jika ya, berapa luas lahannya?

**C. Daftar Pertanyaan****Kehidupan Ekonomi Petani**

- 1) Apa pendapat Anda tentang petani? Kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.
- 2) Apakah Anda memiliki sawah sendiri?
- 3) Apakah Anda buruh lepas atau terikat? (*untuk responden 1*)
- 4) Apakah Anda memiliki penghasilan selain dari pertanian, misalnya berdagang, pegawai negeri, dan sebagainya?

**Kebijakan Pangan Orde Baru**

- 1) Ketika Pemerintah Soeharto mengadakan penyuluhan pertanian, apakah Anda langsung melaksanakan program tersebut?

- 2) Apakah menurut Anda, program Pemerintah tersebut dapat menjadikan pertanian lebih baik dari sebelumnya?
- 3) Apakah hasil produksi pertanian lebih baik dari sebelum memakai teknologi baru atau sebaliknya?
- 4) Jika hasil pertanian lebih baik, apakah pendapatan Anda menjadi lebih baik?

#### **Kebijakan Industri Orde Baru**

- 1) Apa pendapat Anda tentang perindustrian yang semakin pesat di Kabupaten Karawang?
- 2) Apakah Anda merasakan manfaat dari berkembangnya kawasan industri?
- 3) Apakah terdapat perbedaan pada kehidupan ekonomi sebelum dan sesudah ada banyak pabrik?
- 4) Apakah Anda tertarik untuk bekerja di pabrik? (*pertanyaan untuk responden 1, 2, dan 3*)

Lampiran 2

**PETA KABUPATEN KARAWANG**

